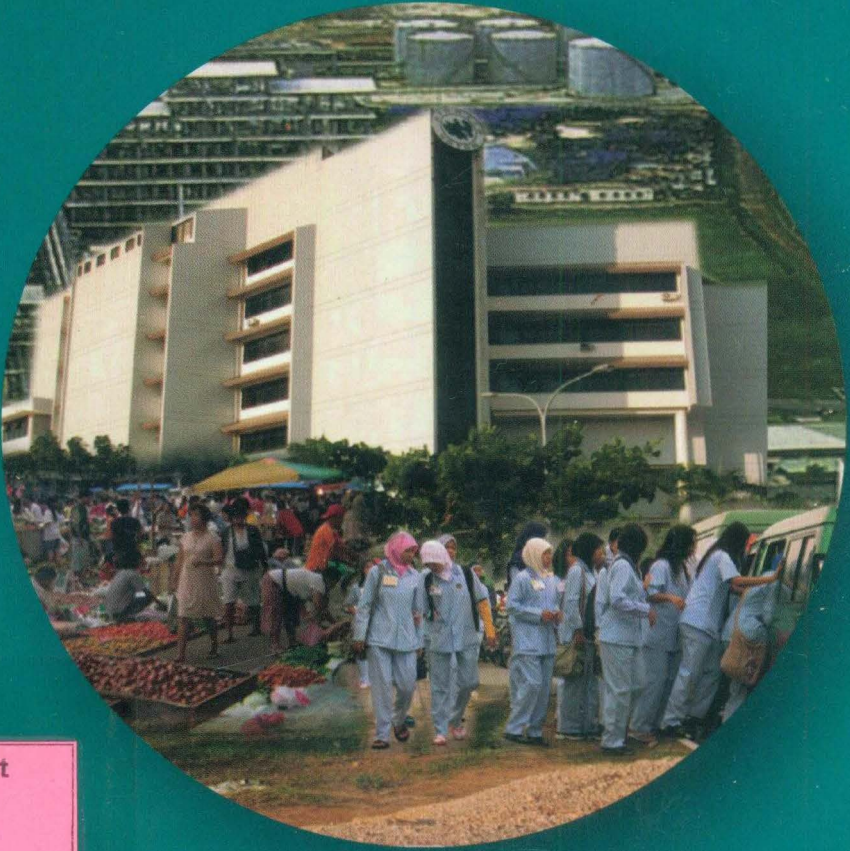


Sita Rohana
Zulkifli Harto

Meniti Riak Gelombang Perubahan:

Kajian Mengenai Orang Melayu
di Perbatasan Kepulauan Riau

Editor: Dwi Setiati



Direktorat
Budayaan

02



DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
TANJUNGPINANG

**Siti Rohana
Zulkifli Harto**

**Meniti Riak Gelombang Perubahan :
Kajian Mengenai Orang
Melayu di Perbatasan
Kepulauan Riau**

Editor : Dwi Setlati

Diterbitkan oleh :
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Tanjungpinang
2006

Meniti Riak Gelombang Perubahan :
**Kajian Mengenai Orang Melayu
di Perbatasan Kepulauan Riau**

Penulis

Siti Rohana
Zulkifli Harto

Editor

Dwi Setiati

Desain Cover

Wildan Afianto

Tata Letak

Cacik Gunarti

Cetakan I, November 2006

Penerbit

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Tanjungpinang

ISBN : 978-979-1281-04-1

SAMBUTAN DIREKTUR TRADISI DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA SENI DAN FILM

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) Tanjungpinang adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Lembaga ini didirikan bukan berdasarkan wilayah administratif, melainkan daerah kebudayaan Melayu yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bangka Belitung. Fungsi lembaga ini adalah melaksanakan pengamatan dan analisis kesejarahan dan kenilaitradisional di wilayah kerjanya.

Kami menganggap penting bahwa hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh tenaga peneliti (fungsional) di setiap Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional selayaknya dipublikasikan kepada khalayak luas, agar masyarakat mengetahui apa yang menjadi isi penelitian tersebut, di samping mendorong minat masyarakat untuk mengetahui dan memahami sejarah dan budaya nusantara yang amat beragam.

Terbitnya buku ini kami sambut dengan antusias sekali dan diharapkan untuk tahun-tahun mendatang penerbitan seperti ini akan lebih banyak dan beragam baik jenis maupun cakupan bahasannya.

Sehubungan dengan itu, kami menyambut baik terbitnya buku yang berjudul: **Meniti Riak Gelombang Perubahan : Kajian Mengenai Orang Melayu di Perbatasan Kepulauan Riau**. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, November 2006
Direktur Tradisi
Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film


I. Gusti Nyoman Widja, SH
NIP. 130 606 820

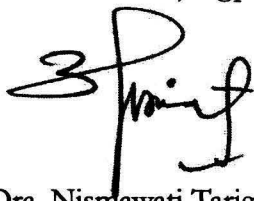
KATA PENGANTAR

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Salah satu tugasnya adalah melakukan penelitian sosial budaya dan inventarisasi untuk kepentingan pelaksanaan kebijakan kebudayaan dalam pembangunan nasional.

Sehubungan dengan itu Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang pada tahun anggaran 2006 menerbitkan 10 (sepuluh) judul buku dari penelitian yang telah dilakukan para peneliti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2000-2005, yang meliputi aspek kesejarahan maupun kebudayaan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para peneliti yang telah bersungguh-sungguh dan penuh dedikasi dalam melakukan penelitian ini, juga kepada divisi penerbitan yang mengupayakan penerbitan ini terwujud.

Dengan terbitnya buku ini, kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih, semoga berguna bagi Bangsa dan Negara yang kita cintai.

Kepala
Balai Kajian Sejarah dan Nilai
Tradisional Tanjungpinang



Dra. Nislawati Tarigan
NIP.131 913 840

DAFTAR ISI

Sambutan Direkturtradisi Ditjen NBSF	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Lingkup Kajian.....	5
BAB II: BATAM PERBATASAN NEGARA.....	7
2.1 Sejarah.....	7
2.2 Keadaan Alam.....	13
2.3 Kependudukan.....	16
BAB III TINJAUAN KAJIAN PERBATASAN.....	18
3.1 Pengantar Kajian Mengenai Perbatasan.....	18
3.1.1 Pengklasifikasian Wilayah Perbatasan	18
3.1.2 Perbatasan Indonesia dalam Persepsi Pusat	20
3.1.3 Migrasi dan Perubahan Sosio-Demografis.....	21
3.2 Menelusuri Sejarah Kawasan Perbatasan Batam.....	21
3.2.1 Masa Kesultanan hingga Masuknya Kolonialisme	22
3.2.2 Masa Kemerdekaan: Penegasan Wilayah Perbatasan	23
3.3 Perbatasan: Arena Penegasan Kedaulatan Negara	27
BAB IV WILAYAH PERBATASAN: ARENA PERTARUNGAN KEPENTINGAN PUSAT DAN LOKAL	29
4.1 Ekonomi.....	31
4.2 Politik.....	37
4.3 Sosial Budaya	40
4.4 Kehidupan di Perbatasan	43
BAB V PENUTUP.....	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Rekomendasi.....	56

DAFTAR PUSTAKA	57
BIOGRAFI PENULIS.....	59

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Wilayah Kepulauan Riau terletak di bagian Utara wilayah Negara Indonesia berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia. Kepulauan berjuduk “segantang lada” ini memiliki lebih dari 513 pulau tersebar di perairan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Kawasan ini, yang berada di perbatasan dengan Singapura dan Malaysia yang sampai tahun 1957 masih berada di bawah kekuasaan Inggris ini kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan Singapura sebagai pusat ekonomi di Asia Tenggara di abad ke-20. Salah satu kotanya, Tanjungpinang, bahkan sempat dikenal sebagai “surga dollar”. Ini merupakan salah satu daya tarik bagi para pendatang, terutama dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan kawasan Indonesia Timur lainnya. Meskipun masa dollar ini berakhir dengan pecahnya konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1963, namun gelombang para pendatang dari berbagai tempat di nusantara tidak pernah surut sampai sekarang. Pada satu kurun waktu mungkin sedikit berkurang, tetapi tidak pernah berhenti sama sekali. Terutama dengan pesatnya perkembangan transportasi, baik darat maupun laut. Terlebih lagi dengan dirintisnya kerjasama tiga negara, Sijori, sejak tahun 80-an yang mendorong tumbuhnya industri-industri multinasional.

Wilayah Riau secara keseluruhan, merupakan wilayah yang dikenal 'kaya' (Mubyarto, 1993). Meskipun dalam hal ini, Riau hanya merujuk pada salah satu wilayahnya, yaitu wilayah daratan yang ada di Sumatera. Sementara, wilayah kepulauan cenderung diabaikan dalam pembangunan politik ekonomi terutama pada masa Orde Baru (Mubyarto 1997, Andaya 1997). Wilayah kepulauan mulai “terangkat” dengan adanya kerjasama Sijori yang direalisasikan pada tahun 90-an. Kerjasama yang diprakarsai oleh Singapura ini tidak hanya menjadi pemacu perkembangan wilayah yang berada di perbatasan ini tetapi kemudian juga menjadi kekuatan untuk “melepaskan diri” dari wilayah daratan dan menjadi wilayah yang berdiri sendiri (Winoto, 2000). Selain itu, kerjasama tiga negara ini juga menandai peralihan dari wilayah

pinggiran yang terabaikan menjadi wilayah pinggiran yang sangat 'penting'. Begitu pula dengan Batam. Adanya kerjasama tiga negara ini telah menumbuhkan pulau yang semula hanya dihuni oleh beberapa ratus penduduk menjadi sebuah pulau penting dalam peta ekonomi nasional. Pulau yang menjadi pusat ekonomi industri dan perdagangan. Bahkan, awalnya pulau ini dikembangkan agar bisa menyaingi Singapura.

Secara historis, wilayah Kepulauan Riau merupakan 'pusat' Melayu, karena di sinilah Kesultanan Melayu berada. Kesultanan yang merujuk pada wilayah yang disebut sebagai 'Alam Melayu'. Sebuah jaringan benang merah yang menghubungkan kerajaan-kerajaan yang berada di Semenanjung Malaya, termasuk Singapura, pantai timur Sumatera, pantai-pantai Kalimantan, dari Brunei ke arah barat hingga Banjarmasin, dan tentu saja Riau-Lingga sendiri (Wee, 1985). Wilayah tersebut kini terbagi dalam lima negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand.

'Alam Melayu' merupakan jaringan yang meluas meliputi tempat-tempat yang saling berhubungan, dimana penguasa atau raja yang memerintah di tempat tersebut memiliki hubungan kekerabatan dalam 'sejarah Melayu' (Wee, 1985). Dalam konteks spasial, 'Alam Melayu' meluas hingga keluar batas negara Indonesia seperti Singapura, Johor, Selangor, Perak, Pahang, dan Trengganu membentang di kawasan yang disatukan oleh perairan Selat Melaka, Laut Cina Selatan, dan selat-selat di bagian selatan seperti Bangka dan Belitung. Dalam penelitiannya, Wee (1985) mendapati bahwa kesadaran 'Alam Melayu' yang masih bertahan di kalangan orang-orang di Kepulauan Riau.

Kata 'Riau' dalam pemahaman mengenai 'Alam Melayu' sendiri merujuk pada pengertian yang berbeda. Dari tahun 1677 sampai 1804 setidaknya ada 6 'Riau' yang berbeda, yang masing-masing merujuk pada realita politik yang berbeda (Wee, 1985). Keenamnya adalah:

- 'Riau' Sultan Ibrahim (1677-1683) merujuk pada dinasti penguasa Melaka.
- 'Riau' Sultan Abd al-Jalil (1708-1716) merujuk pada promosinya dari 'bendahara' menjadi 'sultan'.
- 'Riau' Raja Kecil (1719-1722) merujuk pada tuntutannya atas tahta sebagai keturunan sah dinasti Melaka yang didirikan

oleh Sultan Abd Al-Jalil.

- 'Riau' pada tahun 1722-1778 merujuk pada koalisi antara penakluk Bugis dan keturunan dinasti 'bendahara.'
- 'Riau' pada tahun 1787-1795 merujuk pada kolonisasi Belanda.
- Terakhir, 'Riau' pada tahun 1795-1804 merujuk pada persaingan yang berkembang antara sebagian anggota kelompok Bugis dengan sebagian anggota dinasti 'bendahara.'

Satu kesamaan antara realita politis yang berbeda ini adalah kesemuanya berlokasi di sepanjang Sungai Riau yang berada di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Sampai tahun 1804, nama ini benar-benar merujuk pada pemukiman yang dibangun di sepanjang tepian sungai. Setelah tahun 1804 nama 'Riau' mulai dipakai untuk wilayah yang lebih luas di luar jangkauan Sungai Riau. Nama 'Riau' kemudian tidak hanya merujuk pada Sungai Riau, tetapi perluasan wilayah kekuasaan yang menjadi tempat Bugis di Penyengat memperoleh pendapatannya, di bagian barat berbatasan dengan Bulang dan di bagian selatan dengan Lingga. Sampai 1911, nama 'Riau' dipakai untuk merujuk pembagian wilayah di dalam kerajaan dalam realita politis yang terbagi dalam tiga zona dominasi, yaitu 'Riau' di bawah 'yamtuang muda' Bugis, 'Lingga' di bawah 'sultan,' dan 'Bulang' di bawah 'temenggung.'

Kolonialisme Eropa telah menyebarkan paham nasionalisme yang menjadi bibit perkembangan konsep negara-bangsa. Di dalam konsep ini, perbatasan secara jelas didefinisikan dan ditarik batas tegasnya. Oleh karena itu, batas negara kemudian dipandang sebagai garis yang memisahkan sistem sosial yang berbeda, dan wilayah perbatasan merupakan wilayah pinggirian yang hanya memperoleh legitimasinya melalui relasi dan partisipasinya dalam sistem sosial inti, bukan lagi sebagai sistem sosial yang unik.

Pada tahun 1824, Inggris dan Belanda menandatangani perjanjian yang membagi wilayah kekuasaan mereka di Asia Tenggara yang meliputi wilayah dalam 'Alam Melayu' dengan garis pemisah Selat Utama antara Singapura dan Batam.

'Wilayah Riau' pasca 1824 ini menghasilkan empat tapal-batas. Seperti disinggung di atas, keempat tapal-batas memiliki konsekuensi tindakan politis; mereka tidak muncul dari situasi geografis, yang murni dan sederhana. Walaupun memang ada hambatan navigasi untuk melakukan perjalanan ke Pulau Tujuh, bagaimanapun 'yamtuang muda' harus mengukuhkan kelompok pulau ini keluar dari 'wilayah Riau.' Situasi ini berlangsung sampai tahun 1911 ketika Belanda mencabut kekuasaan 'sultan' terakhir.

Belanda kemudian menempatkan '*Residentie Riouw en Onderboorgheden*' dengan ibukotanya di Tanjungpinang dengan wilayah yang meliputi *afdeeling* Kepulauan Riaubekas wilayah kesultanan Riau-Linggadan *afdeeling* Inderagiri. Pada tahun 1938, *afdeeling* Bengkalis masuk ke dalam Residensi ini; dan pada tahun 1942 beberapa wilayah di pantai Timur Sumatera juga menjadi bagian wilayah kekuasaannya, termasuk beberapa bekas wilayah kekuasaan kerajaan seperti Siak, Pelalawan, dan Rokan (lihat Mochtar Luthfi dkk., 1977: 380-386). Dalam periode ini nama 'Riau' merujuk pada realita politis yang meliputi wilayah yang jauh lebih luas daripada yang pernah dikuasai oleh kerajaan Riau-Lingga, sebuah wilayah yang disatukan melalui kolonisasi Belanda.

Dari tahun 1942 sampai 1945 pada masa kolonisasi Jepang, Residensi Riau digantikan oleh '*Riau Syu*', yang hanya meliputi wilayah Residensi Riau di Sumatera saja, dengan beberapa pulau di lepas pantai. Wilayah kepulauan *afdeeling* Riau, yang sebelumnya merupakan wilayah kerajaan Riau-Lingga, berada di bawah kekuasaan militer yang berpusat di '*Syonanto*' (Singapura). Jadi, dalam periode ini nama 'Riau' benar-benar seluruhnya ditanggalkan dari kepulauan Riau-Lingga, dan hanya merupakan bagian Sumatera saja.

Setelah Perang Dunia II, 1945-1950 merupakan periode pertentangan kepentingan. Belanda ingin menguasai kembali wilayah koloninya dulu, termasuk Residensi Riau. Pada periode ini nama 'Riau' menjadi tidak jelas merujuk pada apa. Akhirnya, konflik tertanggulangi oleh kaum nasionalis yang kemudian memutuskan untuk membentuk provinsi yang bahkan lebih luas wilayahnya dibandingkan wilayah Residensi Belanda. Lalu Residensi Riau digabungkan dalam Provinsi Sumatera Tengah, dan nama 'Riau' hanya dipakai untuk Kabupaten Kepulauan Riau. Kabupaten ini berdasarkan wilayah kepulauan kerajaan

Riau-Lingga. Pada tahun 1958, nama 'Riau' kembali dipakai untuk wilayah yang lebih luas lagi, ketika Provinsi Riau dibentuk dengan wilayah teritorial yang sama seperti pada masa Residensi Riau. Kemudian pada tahun 2003, Kepulauan Riau mulai menjadi provinsi terpisah dari Provinsi Riau. Wilayah provinsi Kepulauan Riau inilah wilayah yang dirujuk dalam penelitian ini.

Latar belakang sejarah Kepulauan Riau dari masa kesultanan ini mempengaruhi pendefinisian Kemelayuan* di wilayah ini. Dapat dikatakan posisinya yang berada di 'perbatasan', di wilayah 'antara', menjadikannya sebagai wilayah yang juga sangat cair terhadap perubahan karena terbukanya kontak dengan banyak pihak. Oleh karena itu, menarik untuk melihat perkembangan Kemelayuan di Kepulauan Riau dewasa ini dikaitkan dengan konteksnya dalam kerangka 'Alam Melayu' yang melintas batas negara, namun juga dalam kerangka negara Indonesia yang memiliki kepentingan ekonomi dan politis di wilayah 'subur' ini.

1.2 Lingkup Kajian

Penelitian ini berangkat dari tiga pertanyaan mendasar. Pertama, bagaimana Kemelayuan sekarang dimaknai oleh orang Melayu yang ada di Kepulauan Riau. Kedua, bagaimana kepentingan-kepentingan di tingkat lokal maupun pusat dalam kaitannya dengan Kemelayuan. Ketiga, bagaimana orang Melayu memaknai diri mereka dalam kerangka 'Alam Melayu' mereka maupun dalam kerangka politik negara Indonesia. Dari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai Kemelayuan di Kepulauan Riau yang dipengaruhi oleh proses sejarah, kebijakan pemerintah, maupun faktor sosial lainnya.

Penelitian ini akan memberi perhatian pada aspek sejarah Kepulauan Riau yang membentuk Kemelayuan di masa lalu, di mana 'Alam Melayu' melingkupinya. Kemudian menarik benang merah dengan pemahaman orang Melayu di masa kini dengan

*Dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Malayness* yang memiliki makna segala hal yang terkait dengan pendefinisian Melayu sebagai identitas

menempatkannya pada konteks politis yang 'memecah' bentang luas 'Alam Melayu' ke dalam wilayah negara-bangsa yang berbeda-beda.

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Batam. Batam dipilih karena kota ini merupakan bentuk mutakhir dari wilayah tengah yang cair dan terbuka terhadap kontak dengan dunia luar dan menjadi arena pertemuan berbagai kepentingan.

Penelitian ini akan banyak memakai kajian pustaka terutama untuk mencari referensi latar sejarah wilayah Kepulauan Riau dan untuk melihat perkembangannya dalam dimensi politis masa lalu hingga sekarang. Selain itu, tim peneliti juga akan melakukan wawancara terhadap beberapa informan orang Melayu untuk memperoleh data mengenai pemahaman mereka mengenai Kemelayuan dikaitkan dengan situasi sekarang ini dan harapan-harapan mereka. Untuk memperkaya data, penulis juga "membuka diri" terhadap data-data yang muncul tidak disengaja yang diperoleh dalam perbincangan sambil-lalu. Data yang diperoleh secara sambil lalu ini juga menjadi ilustrasi untuk permasalahan yang berkaitan.

Penulis juga akan memanfaatkan foto-foto yang relevan dengan topik tulisan sebagai visualisasi yang dapat mendukung laporan penelitian.

Dinamika demografi politik yang terjadi di Kepulauan Riau tidak dapat dilepaskan dari perubahan politik maupun ekonomi yang terjadi di tingkat nasional, di masa lalu maupun di masa kini. Perubahan itu sendiri tercermin dalam persepsi pusat tentang daerah perbatasan.

Penelitian ini akan melihat dinamika sosial budaya di wilayah perbatasan Kepulauan Riau dengan pendekatan demografi politik. Demografi politik adalah sebuah pendekatan yang menempatkan sebuah permasalahan sosial atau kebudayaan sebagai konsekuensi atau implikasi dari adanya interaksi atau hubungan timbal-balik antara pertumbuhan demografis di satu sisi, dan perubahan politik di sisi lain. Memandang dinamika sosial budaya di wilayah perbatasan Kepulauan Riau dari perspektif demografi politik berarti mencoba menerangkan berbagai isu sosial budaya yang muncul di wilayah perbatasan. Hal ini merupakan konsekuensi dan implikasi terjadinya interaksi faktor demografis dan politik di wilayah perbatasan dan sekitarnya.

BAB II

Batam: Perbatasan Negara

2.1 Sejarah

Sejarah Pulau Batam diawali pada awal abad ke-18, ketika Lord Minto dan Raffles dari Kerajaan Inggris melakukan “barter” dengan Pemerintahan Hindia Belanda. Kesepakatan tersebut menghasilkan penyerahan Pulau Batam yang merupakan pulau kembar dengan Singapura kepada Pemerintah Belanda.

Wilayah Kotamadya Batam letaknya yang sangat strategis pada jalur pelayaran internasional yang paling ramai di dunia dengan jarak hanya 12,5 mil laut (20 km) dari Singapura serta pintu gerbang lalulintas wisatawan yang keluar masuk dari/ keluar negeri melalui pelabuhan laut Sekupang. Dengan modal inilah maka pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk memacu perkembangan di wilayah nusantara dari semua aspek kehidupan, khususnya di bidang ekonomi dalam rangka persiapan tinggal landas pada Pelita VI, maka pemerintah mengembangkan Pulau Batam menjadi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OBDIPB).

Guna pemantapan pengembangan sebagaimana fungsi Pulau Batam tersebut menjadi daerah industri dan perdagangan, alih kapal, penumpukan dan basis logistic serta pariwisata, maka dikeluarkan beberapa Surat Keputusan Presiden atau Menteri maupun Dirjen, sebagaimana periodisasi Pimpinan/ Pengembangan Otorita Batam sebagai berikut:

Tahun 1969-1975

Adalah periode persiapan dan permulaan pengembangan, pada periode ini pengembangan Batam lebih ditujukan untuk menunjang kegiatan pertanian dan pencarian minyak lepas pantai dengan ketua Otorita Batam DR. Ibnu Sutowo, diantara periode tersebut telah keluar beberapa Keputusan Presiden antara lain:

- a. Keppres No. 65 Tahun 1970 tanggal 19 Oktober 1970; Tentang Proyek Pengembangan Pulau Batam.
- b. Keppres No. 74 Tahun 1971 tanggal 26 Oktober 1971; Tentang

Pembangunan Pulau Batam dengan membentuk Badan Pimpinan Daerah Industri (Badan Penguasa) dan bertanggung jawab kepada Presiden.

- c. Keppres No. 41 Tahun 1973 tanggal 22 Nopember 1973; Tentang seluruh Pulau Batam dinyatakan sebagai daerah industri.

Pada tanggal 26 Agustus 1974 pemerintah menunjuk beberapa lokasi di Sekupang, Batu Ampar dan Kabil di Pulau Batam sebagai *Bonded Ware House* dan menunjuk PT. Persero Batam sebagai penguasa *Bonded Ware House*.

Tabun 1975-1978

Adalah periode konsolidasi dimana dalam periode ini dititikberatkan untuk konsolidasi dan pemeliharaan prasarana-prasarana dan aset-aset yang ada, sehubungan dengan krisis yang timbul dalam Pertamina, dengan ketua Otorita Batam Prof. Dr. Soemarlin.



Kantor Otorita Batam
(repro Profil Batam 2005)

Pada tahun 1975, karena adanya resesi dalam tubuh Pertamina, maka terjadilah pengalihan tanggung jawab pembangunan Daerah Industri Pulau Batam dari Pertamina ke tangan Pemerintah. Keluar beberapa surat keputusan sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 tahun 1977 tanggal 19 Februari 1977 tentang Pengolahan dan Penggunaan Tanah di Pulau Batam.
- b. Pada tanggal 14 Mei 1977 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 147/Kpb/V/1977, Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 150/LML/1977 dan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.119/0/Phb/1977 tentang Pengembangan Lalu Lintas Perdagangan sesuai kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.
- c. Surat Keputusan Ketua BKPM No. 1 Tahun 1978 tanggal 7 Februari 1978 tentang Pemberian Perlimpahan Wewenang Pengurusan dan Penilaian Pemohonan Penanaman Modal di Pulau Batam.
- d. Pada tanggal 24 Nopember 1978 pemerintah menetapkan seluruh wilayah Pulau Batam menjadi wilayah *Bonded Ware House*.

Tabun 1978-1983

Yaitu periode pematapan rencana dan lanjutan pembangunan prasarana utama dengan ketua Otorita Batam Prof. DR. Ing. B.J. Habibie. Periode ini rencana pengembangan disesuaikan dengan rencana strategi pengembangan, strategi pembangunan nasional dan situasi ekonomi dunia yang sedang mengalami resesi.

Beberapa surat keputusan yang dikeluarkan dalam periode ini antara lain:

- a. Keppres No. 194/M/1978 tanggal 29 Agustus 1978 tentang pengangkatan Prof. DR. Ing. B.J. Habibie sebagai ketua Otorita Batam dan Mayjend. TNI Soedarsono D. Sebagai ketua Badan Pelaksana.
- b. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01-PW-10-01-83 tanggal 7 Juni 1980 tentang penetapan Pulau Batam sebagai daerah berstatus di bidang keimigrasian.

- c. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 70/Kp/I/1983 tanggal 19 Januari 1983 tentang pelimpahan wewenang di bidang perdagangan dan koperasi.
- d. Keppres No. 15 tahun 1983 tanggal 9 Maret 1983 tentang kebijaksanaan pengembangan pariwisata, dalam hal ini pelabuhan laut dan udara di Pulau Batam ditetapkan sebagai pintu masuk wisatawan dari luar negeri.

Tabun 1983-1992

Merupakan periode penanaman modal dan industri serta pengembangannya. Tanggal 27 Desember 1983 diresmikan oleh Bapak Presiden RI prasarana-prasarana utama, sejak periode tersebut daerah industri Pulau Batam mulai dipasarkan secara luas dan secara nyata sudah menunjukkan pengembangan dan hasilnya. Pada tahun 1984 menetapkan semua wilayah Pulau Batam ditambah pulau-pulau Janda Berias, Tanjung Sau, Ngenang, Kasem dan Moi-moi sebagai Bonded Area.

Sejalan dengan perkembangan Pulau Batam tersebut oleh Otorita Batam, sesuai dengan perodesasi pembangunan dan pimpinannya maka dibentuklah Kotamadya Batam berdasarkan PP No. 34 tahun 1983, dalam hal ini wilayah pemerintahannya sama dengan Kecamatan Batam sebelum dibentuknya Kotamadya Batam tersebut dan membawahi 3 (tiga) kecamatan yaitu :

Belakang Padang, Batam Barat dan Batam Timur. Tentang penyelenggaraan pemerintahan, sebagai penjabaran dari pasal ; 17 PP No. 34 tahun 1983, telah keluar KRPPRES No. 7 tahun 1984 tentang : hubungan kerja antara Kotamadya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Dalam Keppres No. 7 tahun 1984 tersebut telah diatur tentang koordinasi sebagai berikut :

Pasal 2, menyebutkan:

Walikomadya Batam, sebagai Kepala Wilayah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam arti memimpin pemerintahan membina kehidupan masyarakat Kotamadya Batam di semua bidang dan mengkoordinasikan bantuan dan dukungan pembangunan daerah industri Pulau Batam.

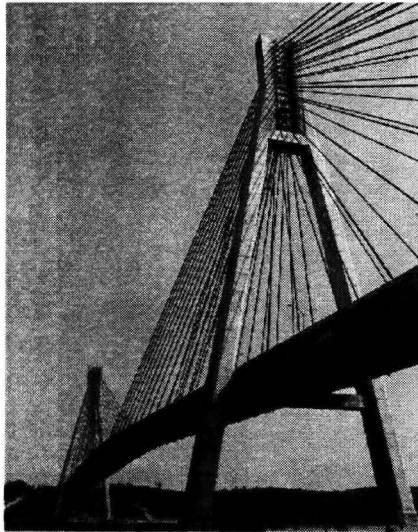
Pasal 3 huruf F, menyebutkan:

Walikotamadya Batam bersama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan instansi-instansi pemerintahan lainnya, guna mewujudkan sinkronisasi program diantara mereka dan sejauh mana mengenai pelaksanaan pembangunan, sarana, prasarana dan fasilitas lainnya yang diperlukan dalam rangka pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

Dalam hal ini telah ditunjuk sebagai Walikotamadya Batam yang pertama Ir. Rahman Draman yang menjabat sebagai walaikota selama periode 1984-1989. Kemudian sejak bulan Oktober 1989 telah pula ditunjuk Walikotamadya Batam yang kedua yaitu Drs. R.A. Aziz.

- Tahun 1992

Dengan Keppres No. 28 Tahun 1992 wilayah kerja Otorita Batam diperluas meliputi wilayah Bareleng (Pulau Batam, Rempang, Galang dan pulau-pulau sekitarnya) dengan luas wilayah seluruhnya sekitar 715 km (115% dari luas Singapura).



Jembatan Bareleng
(repro Profil Batam)

Meniti Riak Gelombang Perubahan :

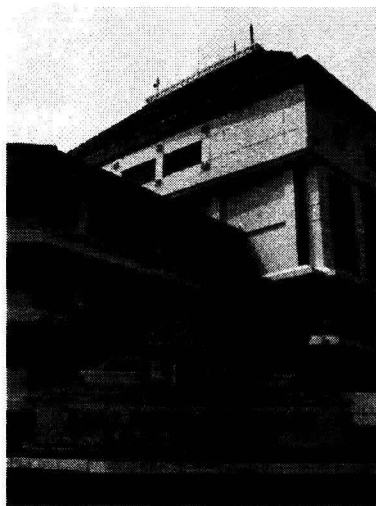
Kajian Mengenai Orang Melayu di Perbatasan Kepulauan Riau

- Tahun 1998

Periode pengembangan pembangunan prasarana dan penanaman modal lanjutan dengan perhatian lebih besar pada kesejahteraan rakyat dan perbaikan iklim investasi. Sebagai ketua dijabat oleh Ismet Abdullah.

- Era Otonomi Daerah sejak Tahun 1999

Dengan keluarnya Undang-undang No. 53 Tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, sebagai pengejawantahan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kota Batam yang semula sebagai Kotamadya Administratif Batam statusnya berubah menjadi daerah Otonomi Kota Batam yang dipimpin oleh Walikota. Untuk itu dalam struktur pemerintahan dan penataan wilayahnya juga mengalami perubahan dimana dari semula terdiri dari 3 kecamatan setelah adanya pemekaran menjadi 8 kecamatan, di samping terjadinya penambahan dinas teknis dan perubahan status beberapa lembaga Instansi Vertikal menjadi Instansi Otonom.



Kantor Walikota Batam
(repro Profil Batam 2005)

Sejalan dengan adanya semangat otonomi daerah dan untuk makin meningkatkannya pembangunan di Kota Batam, maka dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Batam tetap mengikutsertakan Badan Otorita Batam. Hal ini sesuai dengan Nomor 53 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 17 ayat (1): Dengan terbentuknya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, kewenangan daerah sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib kecuali bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lain.
- b. Pasal 17 ayat (2): Kewenangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja.
- c. Pasal 21 ayat (1): Dengan terbentuknya Kota Batam sebagai Daerah Otonomi Kota Batam, Pemerintah Kota Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya mengikutsertakan Badan Otorita Batam.

2.2 Keadaan Alam

Kota Batam terletak antara: $0^{\circ} 55' - 1^{\circ} 55'$ Lintang Utara dan $103^{\circ} .45' - 104^{\circ} .10'$ Bujur Timur.

Wilayah Kota Batam secara administratif berbatasan langsung dengan Kabupaten Kepulauan Riau dan Kabupaten Karimun. Batas-batas wilayah Kota Batam tersebut meliputi:

- Sebelah Utara : Selat Singapura
- Sebelah Selatan: Wilayah Kecamatan Senayang Kabupaten Selingsing
- Sebelah Barat : Kecamatan Karimun dan Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun

- Sebelah Timur : Kecamatan Bintang Utara dan Bintang Selatan,
Kabupaten Kepulauan Riau.

Berdasarkan Undang-undang nomor 53 Tahun 1999 luas wilayah Kota Batam keseluruhannya lebih kurang 1.647,83 Km², yang terdiri dari lautan 1.035,30 Km² dan daratan 612,53 Km², sedangkan banyaknya pulau berjumlah 186 buah dimana 80 buah telah dihuni dan 106 buah pulau lagi masih kosong, diantaranya ada 3 buah pulau yang agak besar yaitu Pulau Batam dengan luas kurang lebih 415 Km², Pulau Bulan dan Pulau Kepala Jeri.

Wilayah Kota Batam seperti halnya kecamatan-kecamatan di daerah Kabupaten Kepulauan Riau, juga merupakan bagian dari paparan kontinental. Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa-sisa erosi atau penyusutan dari daratan pra tersier yang membentang dari semenanjung Malaysia atau Pulau Singapura di bagian utara sampai dengan pulau-pulau Moro dan Kundur serta Karimun di bagian Selatan.

Permukaan tanah di Kota Batam pada umumnya dapat digolongkan datar dengan variasi disana-sini berbukit-bukit dengan ketinggian maksimum 160 meter di atas permukaan laut. Sungai-sungai kecil banyak mengalir dengan aliran pelan dan dikelilingi hutan-hutan serta semak belukar yang lebat.



Peta Batam

Dilihat dari perputaran arus yang ada maka perairan di Kota Batam yang berada di selat Malaka ini merupakan daerah subur bagi kehidupan perikanan dan biota lainnya. Perairan Kota Batam merupakan wilayah ekosistem perikanan Kepulauan Riau yang dipengaruhi oleh gerakan air yang berasal dari Samudera Hindia yang melewati Selat Malaka dan gerakan arus yang berasal dari Laut Cina Selatan.

Ekosistem di wilayah Kota Batam ditemukan satwa liar yang terdiri atas 8 jenis mamalia, 16 jenis *beasaves* dan *partilia*. Tipe habitat yang digunakan satwa liar ini yaitu: pantai *mangrove*, rawa/danau, ladang/kebun, hutan sekunder dan hutan primer.

Kota Batam mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum pada

tahun 2003 berkisar antara 21,2°C 23,2°C dan suhu maksimum berkisar antara 30,6°C 33,5°C, sedangkan suhu rata-rata sepanjang tahun 2001 adalah 26,1°C 27,8°C. Keadaan tekanan udara rata-rata untuk tahun 2002 minimum 1003,8 MBS dan maksimum 1013,5 MBS.

Selanjutnya mengenai kelembaban udara di wilayah Kota Batam rata-rata berkisar antara 82 87%. Kecepatan angin maksimum 14-30 knot atau rata-rata kecepatan angin sebesar 4 knot. Banyaknya hari hujan selama setahun di Kota Batam pada tahun 2003 adalah 188 hari dan banyaknya curah hujan setahun 2.075 mm.

2.3 Kependudukan

Sejak Pulau Batam dan beberapa pulau di sekitarnya dikembangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi daerah industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata serta dengan terbentuknya Kotamadya Batam tanggal 24 Desember 1983, laju pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan penduduk dari hasil sensus penduduk rata-rata per tahunnya selama periode 1990-2000 sebesar 12,87 persen dan laju pertumbuhan penduduk Kota Batam tahun 2003 sebesar 5,46 persen dibanding tahun 2002. Hal ini membuktikan Batam mempunyai daya tarik tersendiri, khususnya bagi pendatang yang ingin mendapatkan lapangan pekerjaan.

Penduduk Kota Batam berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000 berjumlah 434.286 jiwa, sedangkan dari hasil registrasi penduduk tahun 2001 penduduk Kota Batam telah mencapai 527.151 jiwa, tahun 2002 sebesar 533.521 jiwa dan tahun 2003 telah mencapai 562.661 jiwa.

Dari penduduk yang berjumlah 562.661 jiwa tersebut tersebar di delapan kecamatan, 35 kelurahan dan 16 desa. Hanya penyebarannya tidak merata sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk per Km² di daerah ini bervariasi. Penduduk di Batam sebagian besar adalah para pekerja migran yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Gaung Batam sebagai pusat ekonomi baru telah menjadi daya tarik bagi para pendatang untuk mengadu nasib ke pulau ini. Hasilnya, selama beberapa dasawarsa sejak munculnya industri-industri di era 80-an di Batam, pulau ini kebanjiran para pendatang. Terutama dengan adanya kelesuan

ekonomi yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di pulau-pulau padat penduduk seperti Jawa karena kurangnya lapangan pekerjaan. Ditambah lagi dengan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997.

Sampai sekarang, arus pendatang dari berbagai daerah di Indonesia ke kota ini nyaris tidak pernah surut. Padatnya penduduk karena banyaknya pendatang ini sendiri memunculkan masalah tersendiri bagi pemerintah setempat, misalnya masalah pemukiman. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah setempat mulai memperketat arus pendatang yang masuk ke kota ini. Meskipun dalam realisasinya juga banyak menghadapi kendala, karena banyaknya pendatang gelap.

BAB III

Tinjauan Kajian Perbatasan

3.1 Pengantar Kajian mengenai Perbatasan

Perbatasan umumnya dipaparkan dalam hubungannya dengan batas-batas yang memisahkan negara. Boggs (1940: 22) menjabarkan perbatasan sebagai garis frontier, zona yang berada di antara dua negara. Martinez (1994: 10) melihat seringkali perbatasan dibedakan dari frontier, suatu wilayah yang secara fisik terpisah dari pusat kekuasaan. Frontier juga dipandang sebagai zona yang berada di antara wilayah menetap dan tidak menetap, yang menjadi tempat tinggal orang-orang dari pusat kekuasaan. Boggs (1940: 10-11) juga berpendapat bahwa daerah perbatasan memiliki fungsi negatif, yang sifatnya lebih mengikat dan memaksa, bukannya mendukung, misalnya pembatasan dan pelarangan tenaga kerja, aktivitas ilegal, dan penyakit; dalam pemungutan pajak dan cukai, dan dalam pencegahan penyelundupan agar barang-barang dari luar tidak bersaing dengan produk domestik. Lebih jauh lagi, Martinez (1994) mengatakan bahwa perbatasan haruslah dilihat dari pergerakan orang, barang, dan gagasan yang melintasi sebuah perbatasan dan kekuatan-kekuatan yang ada di balik pergerakan tersebut.

Fungsi perbatasan dalam makna modern merupakan hasil dari bangkitnya nasionalisme di Eropa pada beberapa abad terakhir. konsep negara-bangsa (*nation-state*), menyebar pasti melalui kolonialisme Eropa. Di bawah pengertian ini, perbatasan harus didefinisikan dengan tegas, memiliki demarkasi jelas, terjaga, dan eksklusif. Sehingga perbatasan dipandang sebagai garis-garis yang memisahkan sistem sosial yang berbeda, dan perbatasan menjadi wilayah marjinal yang memperoleh legitimasinya hanya melalui relasi dan partisipasinya dalam sistem sosial pusat, bukan lagi sebagai sistem sosial yang tersendiri.

3.1.1 Pengklasifikasian Wilayah Perbatasan

Martinez (1994) mengklasifikasikan wilayah perbatasan ke dalam empat tipe yang secara istoris saling berkait. Tipe-tipe tersebut antara lain:

- Perbatasan yang berasingan (*alienated borderlands*)

Dalam tipe ini pertukaran melintas-batas tidak terjadi karena adanya peperangan, pertikaian politik, nasionalisme yang kuat, animosity ideologis, prasangka religius, perbedaan kultural, atau permusuhan etnis. Dari sudut pandang pemerintah, hubungan internasional diwujudkan melalui militerisasi di wilayah perbatasan meliputi pengawasan yang ketat teradap lalulintas perbatasan. Hal ini membuat warga di perbatasan mengalami kesulitan untuk menjalani kehidupan yang stabil.

- Perbatasan yang saling berdampingan (*coesistent borderlands*)

Dalam tipe ini konflik direduksi hingga ke tingkat yang terkelola namun masih menyisakan persoalan mengenai kepemilikan sumber daya strategis di wilayah perbatasan. Sumber strategis yang seringkali menimbulkan permasalahan antara lain air, kekayaan alam berupa pertambangan maupun hasil hutan.

Kepemilikan sumber daya strategis ini memiliki potensi untuk memicu konflik politis antara dua negara yang saling bertasan, meskipun dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, warga dua negara yang tinggal di perbatasan sendiri mungkin saja tidak menganggap hal tersebut sebagai masalah besar.

- Perbatasan yang saling bergantung (*interdependent borderlands*)

Dimana di wilayah perbatasan ini masing-masing negara yang saling berbatasan secara simbiotik saling bergantung dalam hubungan internasional yang relatif stabil. Warga masing-masing negara yang berbatasan terlibat dalam hubungan ekonomi yang saling menguntungkan nyaris dalam basis yang berimbang. Misalnya salah satunya memiliki fasilitas produksi dan yang lain menyediakan tenaga kerja murah. Indonesia-Malaysia sedang memasuki tahapan ini.

Malaysia yang telah berkembang menjadi negara industri memiliki banyak lapangan kerja di bidang industri, selain juga perkebunan. Jumlah penduduk yang relative sedikit di negara tersebut dengan tingkat pendidikan yang relative tinggi membuat negara tersebut kekuarangan pekerja kasar untuk buruh bangunan, buruh pabrik, atau buruh perkebunan. Sementara, Indonesia memiliki banyak pekerja yang

siap bekerja dalam sektor pekerjaan kasar sekalipun. Oleh sebab itu, hingga saat ini Indonesia menjadi pemasok terbesar tenaga kerja kasar di negara tetangga tersebut, termasuk untuk sektor pekerja rumah tangga.

- Perbatasan yang terintegrasi (*integrated borderland*)

Dimana wilayah perbatasan secara ekonomi saling melebur, nasionalisme kedua negara runtuh, dan negara-negaranya pun saling beraliansi. Dalam kondisi ini, kedua negara relatif memiliki hubungan yang setara.

3.1.2 Perbatasan Indonesia dalam Persepsi Pusat

Tirtosudarmo (2002) mengatakan sejak awal Orde Baru, obsesi tentang integrasi nasional dan modernisasi memperoleh bentuk sempurna melalui berbagai kebijakan dan program yang dirancang oleh dua pendukung utamanya, yaitu elit militer dan para ekonomo-teknokrat. Kedua aktor utama ini ternyata memiliki kesamaan dalam memandang masyarakat, yaitu, pertama, sebagai sekumpulan manusia yang memiliki keseragaman dalam berbagai karakteristiknya. Kedua, kumpulan manusia yang menempati sebuah ruang geografis yang dibayangkan sebagai bidang datar. Berdasarkan pandangan tersebut masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang secara rasional-sistematis dapat didesain dan direkayasa dari sebuah pusat pengendali tertentu menuju kearah yang diinginkan.

Perbedaan dan keragaman etnik yang melekat dalam suatu masyarakat dianggap tidak ada dan tidak relevan dalam rekayasa sosial dan perencanaan pembangunan. Hasilnya, kebijakan dan program pun dibuat seragam di seluruh wilayah Indonesia dan dijalankan dengan pengendalian terpusat. Perencanaan pembangun cukup didasarkan atas angka-angka statistik demografi-ekonomis dan berbagai indikator ekonomis yang bersifat agregatif.

Tirtosudarmo (ibid.) menambahkan, elit militer yang paling merasa mewarisi semangat penjuang kemerdekaan menentang penjajah, menganggap diri sebagai satu-satunya golongan yang paling berkepentingan untuk menjaga kesatuan wilayah dan integrasi nasional. Jika ekonom-teknokrat bekerja berlandaskan persepsi tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, militer bergerak karena

adanya persepsi tentang ancaman terhadap keutuhan Negara. Kedua persepsi ini saling melengkapi, dan sama-sama mengandung konsepsi tentang sebuah masyarakat yang '*socially and culturally homogenous*'.

Keragaman dan heterogenitas etnis yang terdapat dalam masyarakat Indonesia nyaris tidak ada dalam imajinasi kaum ekonomi-teknokrat dan militer. Menurut Tirtosudarmo (ibid.) proses rekonstruksi wacana etnisitas pada masa Orde Baru mencapai puncaknya ketika berhasil dikemas dalam konsep SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) yang menjadi acuan utama kebijakan negara. Konsep ini mengandaikan sebuah masyarakat yang tanpa konflik dan penuh harmoni. Implikasinya, perbedaan dan keragaman dianggap sebagai sumber konflik yang harus dihindari. Oleh karena itu heterogenitas etnis yang melekat pada masyarakat Indonesia harus dilebur melalui berbagai kebijakan dan program, sehingga kemudian muncul apa yang disebut sebagai kebudayaan dan kepribadian nasional yang merupakan 'jati diri' bangsa Indonesia.

3.1.3 Migrasi dan Perubahan Sosio-Demografis

Wilayah Kepulauan Riau merupakan wilayah yang pada masa sebelum abad ke-19 menyatu di bawah satu kekuasaan dengan wilayah Semenanjung Malaya, dalam satu ruang bernama Alam Melayu. Oleh karena itu, secara sosio-histories wilayah-wilayah dalam ruang yang sama ini pun sangat dekat satu dengan yang lain. Meskipun, wilayah tersebut kini terpecah dalam tiga negara bangsa: Indonesia, Singapura, dan Malaysia, namun kedekatan hubungan antara ketiga negara ini masih erat, terutama di wilayah perbatasannya. Tidak hanya secara sosio-historis semata tetapi juga dalam ekonomi. Ditunjukkan dengan arus lintas-batas barang dan manusia yang mewarnai aktivitas ekonomi masyarakatnya, baik legal maupun illegal.

3.2 Menelusur Sejarah Kawasan Perbatasan Batam

Kajian mengenai kawasan perbatasan haruslah dikaji dalam konteks historis dan etnografis. Tiga puluh tahun lampau kawasan Kepulauan Riau hanyalah merupakan kawasan frontier yang jauh dari jangkauan negara, sehingga lebih berorientasi ke Singapura. Dengan dikembangkannya Batam sebagai sebuah wilayah dengan tata ruang

terencana dan memiliki pemerintahan sendiri telah mendorong pertumbuhan penduduk yang sebagian illegal, munculnya pemukiman kumuh, dan prostitusi lebih banyak untuk orang Singapura.

Dalam dua dasawarsa terakhir, Singapura dan Malaysia telah mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat dibandingkan Indonesia. Perkembangan ini menjadikan kedua negara tersebut mulai memperhatikan arus manusia dan barang lintas-batas.

Di pihak Indonesia, khususnya Kepulauan Riau, arus keluar-masuk dari dan ke luar negeri sangat mudah karena adanya kelonggaran pajak fiskal di Provinsi Riau. (di semua pelabuhan keluar negeri, warga Negara Indonesia dipungut pajak setiap kali mereka ke luar negeri. Pajak ini besar-kecilnya tergantung pada bagaimana seseorang akan pergi, apakah melalui jalur darat, air, atau udara. Pergi lewat jalur udara paling mahal, mencapai \$100. Di Riau, pajak fiskal dihapuskan pada tahun 1983. Habibie mengatakan bahwa berbagai fasilitas di imigrasi adalah untuk memberikan insentif bagi investor asing yang membangun bisnis atau menanamkan modal di Batam (Smith 1996:147).

Arus barang dan orang seringkali diselundupkan dari wilayah Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjungpinang, dan Tanjungbalai-Karimun ke Malaysia dan Singapura. Pada siang hari, para penyelundup secara terbuka membawa potongan-potongan besi untuk dijual ke Singapura, mereka kembali membawa *furniture* dan elektronik bekas untuk dijual di pasar barang bekas yang ada di berbagai tempat. Malamnya, para migran diselundupkan ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan-perkebunan atau konstruksi yang ada di seluruh negeri.

Berikut ini akan kita lihat bagaimana latar sejarah yang membentuk kawasan perbatasan Kepulauan Riau dewasa ini.

3.2.1 Masa Kesultanan hingga Masuknya Kolonialisme

Malaka, bandar utama di kawasan semenanjung Melayu, muncul sebagai kekuatan pada abad ke-14, sebelum akhirnya jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Sultan Malaka kemudian menyingkir dan pusat pemerintahan pun mengalami perpindahan ke beberapa tempat di semenanjung. Pada abad ke-18 pusat pemerintahan berpindah ke Kepulauan Riau. Kesultanan Johor yang terbentuk menyatukan Riau dengan semenanjung Melayu. Pada masa ini, yang sekarang dikenal

sebagai pelabuhan Tanjungpinang, menjadi Bandar utama di kawasan ini.

Di akhir abad ke-16, Belanda mulai menguasai wilayah nusantara dan mulai membangun Batavia (sekarang Jakarta) sebagai basis VOC di tahun 1619. Belanda juga tertarik pada kawasan kepulauan dan merebut Malaka dari tangan Portugis pada tahun 1641 dan menjadikan Malaka sebagai Bandar utama di kawasan ini. Namun, seperti halnya Portugis, Belanda juga gagal mendominasi perdagangan seperti pada masa kejayaan Malaka dulu, karena mereka gagal membina hubungan dengan negara-negara kecil.

Akhir abad ke-17, Johor berkembang menjadi kekuatan utama di kepulauan dan lambat-laun menyerap perdagangan dari Malaka. Awal abad ke-18, ibukota Johor dipindahkan ke Riau.

Riau yang terletak di silang lalulintas maritim, pelabuhan Riau, menawarkan lingkungan yang menarik, pelabuhannya menjadi pasar internasional. Seperti ketika masih berada di Johor, Riau pun menjadi pusat perkembangan Islam.

Pada abad ke-18, kelompok migran Bugis yang dikenal sebagai pedagang dan pejuang, mendapatkan kekuasaan dan membentuk aliansi politik dan ekonomi dan memperoleh posisi dalam kesultanan melayu di Riau-Johor.

Pertengahan abad ke-18 juga merupakan saat semakin meningkatnya migran Cina di Asia Tenggara seperti di Riau, Bangka, dan Borneo, ketika perkebunan gambir muncul di Riau dan pertambangan timah di Bangka.

Sepanjang abad, konflik utama muncul antara orang Melayu, Bugis, dan Belanda, masing-masing berebut untuk menjadi penguasa di kawasan ini.

3.2.2 Masa Kemerdekaan: Penegasan Wilayah Perbatasan

Karena letaknya yang berada di perbatasan dengan negara lain, Kepulauan Riau memiliki arti yang strategis dipandang dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Peristiwa konfrontasi dengan Malaysia sangat berpengaruh terhadap pandangan masyarakat setempat mengenai diri mereka, negara, maupun negara tetangga. Pada awal tahun 1960 negara Malaysia lahir. Sukarno menganggap negara baru ini merupakan negara boneka Inggris yang merupakan ancaman

imperialisme Barat. Kemudian Sukarno melakukan perlawanan terhadap pembentukan negara baru ini dan melancarkan politik konfrontasi. Beberapa pulau di Kepulauan Riau pun menjadi basis perlawanan terhadap Malaysia. Konflik ini telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kepulauan Riau.

Bagi sebagian orang di Kepulauan Riau, masa Indonesia terbagi dalam tiga periode berbedaperiode perdagangan bebas, 'Konfrontasi,' dan 'Orde Baru'. Dari tahun 1950 hingga 1963, Kabupaten Kepulauan Riau yaitu Riau, Lingga, dan Pulau Tujuh merupakan zona perdagangan bebas. Ini adalah kelanjutan kebijakan Belanda pada era kolonial, ketika Kepulauan Riau-Lingga-Pulau Tujuh dijadikan wilayah 'bebas pajak'. Sehingga, seperti sebelumnya, barang impor ke zona ini tidak dipungut pajak; pajak hanya dikenakan pada barang impor yang dibawa ke daerah-daerah lain di republik ini.

Selain itu, mata uang yang berlaku di zona perdagangan bebas ini bukanlah rupiah Indonesia, melainkan dollar Inggris Malaya (lihat Muchtar Lufti et al 1977: 631). Akibatnya, barang impor jauh lebih murah dan lebih mudah diakses oleh penduduk di zona ini daripada orang-orang Indonesia lainnya. Bahkan, informan-informan mengenang periode ini sebagai masa kejayaan ekonomi.

Dari tahun 1950 hingga 1958 Kepulauan Riau-Lingga dan Pulau Tujuh membentuk unit administratif Kabupaten Kepulauan Riau, yang berada di bawah Provinsi Sumatera Tengah, dengan ibukotanya di Bukittinggi, Sumatera Barat (lihat *ibid.*: 625-626). Pada tahun 1958, Provinsi Riau menjadi provinsi yang terpisah dari Provinsi Sumatera Tengah, dengan ibukota di Tanjungpinang (lihat *ibid.* 667-672). Tanjungpinang tidak lagi hanya menjadi pusat jaringan perdagangan regional tetapi juga menjadi pusat administratif.

Situasi ini mendukung otonomi ekonomi dan politik regional. Sampai kemudian pemerintah Indonesia mengambil berbagai tindakan untuk mengubah situasi ini guna meningkatkan integrasi Riau-Lingga dan Pulau Tujuh ke dalam konteks nasional. Perubahan yang terpenting terjadi pada tahun 1960 ketika ibukota provinsi dipindahkan dari Tanjungpinang ke Pekanbaru di daratan Sumatera (lihat *ibid.*: 696-697).

Peristiwa penting berikutnya adalah 'Konfrontasi'. Pada tahun 1963, Presiden Sukarno menyatakan 'konfrontasi' melawan

pembentukan negara bangsa baru Malaysia yang meliputi wilayah Malaya, Singapura, dan Kalimantan Utara. Hubungan diplomatik dan perdagangan antara kedua negara ini pun terputus. Seperti ditulis oleh Muchtar Lufti et al (ibid.: 703-704), Riau adalah wilayah Indonesia yang paling merasakan dampak 'Konfrontasi', karena mereka bergantung sepenuhnya pada perdagangan internasional kawasan ini. Berbagai upaya pemerintah pusat untuk memperbaiki perdagangan internasional ini pun gagal. Akibatnya, penyelundupan semakin meningkat diiringi dengan perkembangan pasar-pasar gelap.

Pemerintah pusat juga menghapus pemakaian mata uang Malaysia di Riau, dan memperkenalkan mata uang baru untuk kawasan ini yaitu 'Rupiah Kepulauan Riau', KRRP. Karena pada waktu itu pasar pertukaran uang untuk seribu rupiah Indonesia sebanding dengan tiga dollar Malaysia (Rp. 1.000 = M\$ 3), begitu juga dengan pasar pertukaran rupiah dengan mata uang KRRP.

Kabupaten Kepulauan Riau kemudian menjadi kawasan yang secara ekonomi terisolir, terlepas dari perdagangan internasional, dan juga terpisah dari bagian-bagian republik lainnya, termasuk Provinsi Riau yang berada di Sumatera yang menggunakan rupiah Indonesia (lihat ibid.: 704). Dalam ingatan para informan, periode konfrontasi merupakan periode kesulitan ekonomi, ketika beras sangat sulit diperoleh, dan ketika mereka harus terlibat dengan penyelundupan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak di antara mereka yang rutin menyelundup ke Malaysia melalui Pengerang di bagian tenggara Semenanjung Malaysia, yang menjadi pusat perdagangan mereka.

Sangat menarik untuk disinggung adalah peran masyarakat Melayu di Kepulauan Riau dalam konfrontasi. Pada masa itu, pemerintah Indonesia membentuk pemerintahan bayangan yang diberi nama 'Republik Malaya,' lengkap dengan angkatan perangnya, 'Tentara Nasional Malaya' (TNM). Pemerintah ini berbasis di di Belakang Padang di Pulau Bulan, dan Tanjungbalai di Karimun. Latihan militer TNM berada di Batam. Muchtar Lufti et al (ibid.: 705-706) menunjukkan bahwa Riau memang menjadi basis militer Indonesia dalam konfrontasi dengan Malaysia. Pasukan ditempatkan di pulau-pulau dan wilayah pesisir terdekat ke Singapura dan Semenanjung Malaya.

Dalam penelitian Wee (1984) dikatakan bahwa beberapa

bangsawan Melayu di Riau direkrut dalam pemerintahan bayangan ini, untuk meningkatkan komponen kemelayuan, anggota lainnya adalah orang Minangkabau dari Sumatera maupun dari Semenanjung Malaya. Perekrutan ini sendiri merupakan pilihan yang tidak bisa ditolak, karena bila ditolak mereka akan dikenai tuduhan-tuduhan pemberontak. Selain itu, yang membuat orang-orang Melayu semakin tidak nyaman adalah keterlibatan beberapa anggota Partai Komunis Melaya dalam TNM; yang sebagian besar di antara mereka adalah etnis Cina dari Malaya dan Singapura, laki-laki maupun perempuan. Tetapi mereka tidak dapat berkata lain, keterlibatan mereka karena dipaksa untuk menjadi simbol.

Dalam disertasi Wee tersebut dikisahkan bagaimana, mereka kemudian memiliki peluang untuk sembunyi-sembunyi mengekspresikan penolakan mereka. Pemerintah Indonesia memutuskan bahwa invasi ke Malaysia harus dengan memakai pasukan parasut yang mendarat di Johor. Ketika ini dilaksanakan, banyak orang Melayu dalam pemerintah bayangan yang dipilih sebagai pasukan parasut yang akan berperan dalam invasi. Menurut informan-informan kami, mereka yang ditugaskan mengatakan: mengapa mereka harus membantu orang Jawa untuk memerangi kerabat kita sendiri di Malaysia? Akibatnya, mereka hanya memilih nama-nama Jawa sebagai pasukan parasut. Lalu, dengan sembunyi-sembunyi mereka mengirim informasi melalui radio pada pemerintah Malaysia mengenai waktu dan tempat invasi. Hasilnya, pasukan Malaysia telah bersiap menunggu begitu pasukan parasut mendarat.

Lalu, kegagalan kudeta oleh Partai Komunis Indonesia yang dikenal sebagai 'Gerakan 30 September' (1965). Banyak warga Melayu di Kepulauan Riau mengatakan bahwa mereka cepat menyampaikan pernyataan publik untuk menyerang Komunis karena telah mengelabui mereka. Mereka mengatakan, siapapun yang tidak segera melakukannya akan dipenjarakan atau dieksekusi. Selain karena menjadi basis militer selama konfrontasi, Kabupaten Kepulauan Riau tidak pernah dianggap sebagai basis komunis

Orde Baru yang muncul segera setelah kegagalan pemberontakan PKI merujuk pada pemerintahan Suharto, yang menggantikan rezim Sukarno (lihat Muchtar Lufti et al ibid.: 11-752). Meskipun selama beberapa waktu di bawah Orde Baru merupakan masa-masa yang sulit,

bagi Kabupaten Kepulauan Riau umumnya ini merupakan periode yang relatif stabil, terutama jika dibandingkan dengan pergolakan pada masa konfrontasi dan pemberontakan G 30 S/ PKI. Integrasi ekonomi kabupaten ke dalam ekonomi Indonesia dimulai pada periode ini: (ditandai dengan) penggantian KRRP dengan rupiah Indonesia.

3.3 Perbatasan: Arena Penegasan Kedaulatan Negara

Batas wilayah darat Indonesia adalah batas yang disepakati oleh pemerintah Hindia Belanda dengan pemerintah Inggris dan Portugal di masa kolonial. Batas wilayah negara Indonesia di Kepulauan Riau sendiri merupakan hasil dari kesepakatan antara pemerintah Hindia Belanda dengan Inggris.

Batas wilayah laut Indonesia mencakup beberapa kawasan laut, yaitu perairan pedalaman, perairan Nusantara, dan laut teritorial. Ketentuan-ketentuan yang mengatur perbatasan laut ini antara lain: di wilayah perairan pedalaman, kapal asing tidak mempunyai hak lewat secara damai. Sedangkan di perairan nusantara, kapal asing memiliki hak untuk lewat secara damai. Wilayah perairan Nusantara sendiri telah berkembang sekitar 3 juta kilometer persegi dari 100 ribu kilometer persegi pada masa kemerdekaan.

Sedangkan laut teritorial, yaitu wilayah yang meliputi laut selebar 12 mil yang mengelilingi daratan Indonesia. Dalam kasus laut teritorial yang berhadapan dengan negara tetangga dengan lebar kurang dari 24 mil, batasnya ditetapkan berdasarkan perjanjian dengan negara tetangga yang bersangkutan. Dalam hal ini sudah ada perjanjian antara Indonesia dan Malaysia untuk bagian tertentu di Selat Malaka, serta antara Indonesia dengan Singapura mengenai bagian tertentu di Selat Singapura. Namun, batas tersebut belum sempurna.

Sejak lama Indonesia mengharapkan penyelesaian penentuan batas wilayah tersebut demi kepastian penegakan hukum di kawasan tersebut, namun hingga kini belum ada tanggapan dari Malaysia maupun Singapura. Menurut Djalal (2005) tidak adanya kejelasan mengenai perbatasan dengan negara tetangga ini menimbulkan kerawanan di kawasan ini. Ditambah lagi dengan lemahnya pengawasan terhadap kapal perang atau pesawat terbang asing yang melintasi wilayah negara ini, serta kurangnya kemampuan pengamanan pertahanan laut.

Akibatnya, banyak kekayaan laut Indonesia dijarah dan dirusah oleh pihak asing. Banyak juga kapal-kapal asing yang melakukan pencurian benda sejarah laut, penyelundupan, imigrasi gelap, pembalakan liar, dan lain-lain.

Untuk kawasan Kepulauan Riau, Batam khususnya, kurangnya pengawasan di wilayah perbatasan menyebabkan tingginya angka penyelundupan barang-barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia. Baik berupa barang-barang konsumsi maupun sampah-sampah industri yang berbahaya. Sementara dari wilayah Indonesia juga marak penyelundupan seperti minyak (karena harga di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di Singaputa) dan tenaga kerja illegal.

Masalah penjagaan kawasan perbatasan yang begitu rumit tidak hanya berkaitan dengan wilayah perbatasan laut. Penjagaan wilayah perbatasan di daratan pun demikian. Seperti yang terjadi di daratan Kalimantan. Namun, masalah yang lebih berat memang dihadapi dalam penjagaan kawasan perbatasan laut. Seperti yang terjadi di Kepulauan Riau

BAB IV

Wilayah Perbatasan: Arena Pertarungan Kepentingan Pusat dan Lokal

Salah satu wilayah perbatasan yang berhadapan langsung dengan Negara tetangga Malaysia dan Singapura adalah wilayah Provinsi Kepulauan Riau khususnya Pulau Batam. Karakteristik geografis dan sosial budaya yang ada di daerah ini (Pulau Batam) tidak sama dengan daerah perbatasan lainnya di Indonesia.

Wilayah perbatasan di daerah ini letaknya sangat strategis karena merupakan jalur perlintasan dunia sehingga tidak mengherankan kalau potensi ekonominya menjadi sangat besar ditambah lagi dengan dukungan pemerintah pusat dengan di keluarkannya berbagai kebijakan yang menetapkan Pulau Batam sebagai daerah industri dengan pengelolaan yang khusus.

Pertumbuhan dan pengembangan Pulau Batam tidaklah terjadi begitu saja, sebab pada awalnya pulau ini adalah pulau yang sepi dengan penduduk tidak lebih dari 6000 jiwa berdiam di kawasan pesisir pantai sedangkan daratannya sebahagian besar adalah merupakan hutan dan rawa-rawa.

Perkembangan daerah ini dirintis sejak 35 tahun yang lalu dan hal itu tidak terlepas dari keinginan pemerintah pusat yang melihat bahwa daerah ini pada awalnya hanya sebagai basis logistik dan operasional bagi usaha yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai ternyata perlu dikembangkan karena berdekatan dengan Malaysia dan Singapura sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi daerah industri yang memiliki arti penting bagi kehidupan ekonomi nasional.

Bukti dari keinginan pemerintah pusat untuk mengembangkan daerah perbatasan ini yaitu dengan mengeluarkan berbagai kebijakan seperti antara lain menetapkan dasar hukum pembangunan Pulau Batam, sejak awal tidak kurang telah dikeluarkan 8 Keputusan Presiden, 1 Peraturan Pemerintah, 1 SK Menteri, dan 1 SK Ketua Badan Pertanahan Negara.

Berbagai kebijakan pemerintah untuk Pulau Batam tujuannya adalah dalam rangka mempercepat pengembangunan dan pembangunannya sebagai salah satu daerah perbatasan yang memiliki

potensi besar untuk dikembangkan sebagai daerah pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat mengejar ketinggalannya dengan Negara tetangga yang sudah lebih maju dan makmur.

Secara bertahap dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah untuk pengembangan daerah ini terbukti ampuh telah mendorong pertumbuhan dan kemajuan daerah ini, dan tentu saja berimbas pada peningkatan jumlah penduduk yang berada di daerah ini.

Pertumbuhan penduduk meningkat tajam dari tahun ke tahun, sebelumnya jumlah penduduk yang hanya berkisar 6000 jiwa menjadi 31.800 jiwa pada tahun 1978, memasuki tahun 1990 tercatat 90.800 jiwa dan saat ini (tahun 2005) telah meningkat menjadi 599.561 jiwa.

Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat didorong oleh peluang yang ada di daerah ini sehingga kedatangan para pencari kerja yang begitu besar dari berbagai daerah dengan berbagai latar belakang, budaya, status sosial, dan agama tentu saja berdampak pada munculnya berbagai permasalahan dan problem yang diakibatkan.

Pulau Batam yang merupakan kawasan rumpun Melayu tentu saja mereka sudah lebih dahulu menempati daerah ini dan merupakan masyarakat tempatan. Keberadaan masyarakat Melayu di pulau ini cukup memberi andil pada perkembangan daerah perbatasan ini karena sebagai tuan rumah masyarakat Melayu terkenal cukup terbuka terhadap berbagai kaum pendatang tanpa membedakan asal-usul dan budaya yang terpenting adalah hidup rukun dan saling menghormati. Keterbukaan masyarakat Melayu tersebut sangat mendukung pembangunan daerah ini karena dengan kehidupan yang kondusif tentu saja akan memperlancar berbagai program pembangunan daerah ini.

Pulau Batam yang telah tumbuh dan berkembang pesat serta menjadi salah satu daerah perbatasan yang mampu menyumbang devisa Negara ini bukan berarti tidak ada problema yang muncul sebagai akibatnya tetapi di balik itu sebenarnya bermunculan berbagai permasalahan sosial dan berbagai kepentingan termasuk antara pusat dan daerah 'seakan' ingin memperebutkan daerah tersebut. Walau banyak sudah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mengatur tatanan kehidupan di daerah tersebut namun tumpang tindih kewenangan di lapangan selalu saja terjadi khususnya antara Otorita Batam sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dengan

pemerintah Otonomi Kota Batam. Selain itu, instansi vertikal khususnya perhubungan dan pengelolaan sumber daya tertentu yang masih dilaksanakan oleh pemerintah pusat dikhawatirkan dapat memicu 'pertarungan' antara kepentingan pusat dan daerah.

4.1 Ekonomi

Awal pembangunan daerah Batam dirintis sejak 35 tahun yang lalu, dimana hal itu tidak lepas dari keinginan pemerintah pusat yang melihat potensi daerah ini sebagai wilayah perbatasan yang merupakan jalur perlintasan dunia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar jika dikelola secara khusus. Hal itu diwujudkan dengan dikeluarkannya berbagai Keppres sebagai landasan hukum pembangunannya.

Sebelum tahun 70-an Pulau Batam hanyalah pulau yang sepi, status daerah ini hanya bagian dari wilayah kecamatan Belakang Padang. Jumlah penduduk masih sangat sedikit itupun sebagian besar menetap di kawasan pesisir pantai.

Pada masa kemerdekaan hingga tahun 1963 daerah ini sebenarnya pernah mengalami kemakmuran, dimana alat tukar yang digunakan pada masa itu adalah mata uang dollar Singapura. Hal itu tidak terlepas dari letak geografis daerah ini yang sangat dekat dengan Negara tetangga Singapura (sekitar 20 km) sehingga hubungan antara daerah ini dengan Singapura hampir tidak ada batasnya. Setiap kegiatan ekonomi seperti keluar masuk barang tidak dikenakan pajak (Bea Cukai), jaringan perdagangan sangat bebas.

Tingkat perekonomian masyarakat pada waktu itu terbilang cukup makmur jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Kedudukan selat Malaka dan Singapura sebagai pusat perdagangan dunia sangat menguntungkan bagi masyarakat di daerah ini.

Kemajuan Singapura membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat di daerah perbatasan ini. Hubungan ekonomi daerah ini dengan negara luar sudah berlangsung sejak lama terlebih bagi Negara Singapura dan Malaysia yang membutuhkan berbagai hasil laut dan pertanian dari orang-orang Melayu di Kepulauan Riau dan sebaliknya orang-orang Melayu di Kepulauan Riau membutuhkan barang dari Singapura dan Malaysia seperti: sabun, gula, peralatan elektronika dan lain-lain. Oleh sebab itu tidak mengherankan

apabila alat tukar yang digunakan adalah mata uang dolar Singapura.

Orang Melayu di Kepulauan Riau yang sebahagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan merasakan kemakmuran karena nilai jual hasil tangkapan yang mereka peroleh di laut dihargai dengan mata uang dolar. Demikian juga halnya bagi mereka yang bermata pencaharian sebagai petani atau pekerjaan lainnya di daerah ini. Bagi PNS dan TNI/Polri yang bertugas di daerah ini memperoleh gaji dengan mata uang dolar Singapura sehingga kehidupan mereka dapat dikatakan sangat sejahtera. Kesejahteraan yang mereka peroleh di daerah ini membuat mereka enggan jika harus dipindahkan ke daerah lain di luar Kepulauan Riau.

Kesejahteraan yang dinikmati oleh seluruh masyarakat Kepulauan Riau pada waktu itu tidak berlangsung lama sebab akibat konfrontasi bangsa Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1963 berdampak pada pemberlakuan dedolarisasi atau penggantian mata uang dolar kepada mata uang rupiah (KRRP) tepatnya mulai diberlakukan pada tanggal 15 Oktober 1963. Dengan keluarnya kebijakan tersebut otomatis alat tukar resmi yang digunakan harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, juga diberlakukan pemungutan bea dan cukai serta SWI (Sumbangan Wajib Istimewa). Sebenarnya masyarakat di perbatasan ini belum siap menerima kebijakan tersebut sebab berdampak pada mahalannya harga berbagai kebutuhan sehari-hari khususnya beras dan selain itu distribusi juga terhambat.

Permasalahan lainnya yang muncul adalah sulitnya mendapatkan air bersih terutama bagi masyarakat yang berdiam di sekitar pulau perbatasan ini karena sebelumnya pasokan air diperoleh dari Singapura. Masalah air ini cukup pelik karena merupakan sumber kehidupan. Untungnya, Pertamina Pulau Sambu bersedia memasok air ke kawasan tersebut yang diangkut melalui kapal Pertamina. Karena permasalahan ini Pertamina melakukan survei pencarian sumber air di Pulau Batam dan akhirnya ditemukan sebuah sungai masyarakat setempat menyebutnya dengan Sungai Pembunuh, karena dahulunya daerah ini merupakan tempat berkumpulnya para lanun. Pada tahun 1968 dilakukan pembangunan waduk di sungai tersebut dan namanya dirubah menjadi Sungai Harapan.

Keberadaan Pertamina di Pulau Sambu telah ada sejak masa

kemerdekaan namun jauh sebelum masa itu sebenarnya basis logistik minyak di sana telah dirintis oleh pemerintah Belanda pada tahun 1897 dimana pihak Belanda pada waktu itu berkeinginan memiliki suatu depot perminyakan yang bertujuan untuk kepentingan eksport. Pulau Sambu dianggap strategis karena letaknya yang berada di perlintasan kapal-kapal dari berbagai belahan dunia.

Awal pembangunan Pulau Batam yang dimulai pada era tahun 70-an, daerah ini merupakan areal projek di bawah koordinasi Pertamina. Berbagai pembangunan Infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan lain-lain tapi hal itu tidak berlangsung lama karena tidak lama setelah itu Pertamina dikabarkan mengalami resesi hingga pembangunan yang di komandoi pertamina terhenti.

Selanjutnya, atas kebijakan pemerintah pusat yang sangat berkeinginan membangun daerah perbatasan ini kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Presiden No. 74 tahun 1971 tentang pembangunan Pulau Batam. Dalam Keppres ini secara jelas menyebutkan bahwa Pulau Batam ditetapkan sebagai daerah industri dan dikelola secara khusus dengan membentuk suatu badan dengan tugas:

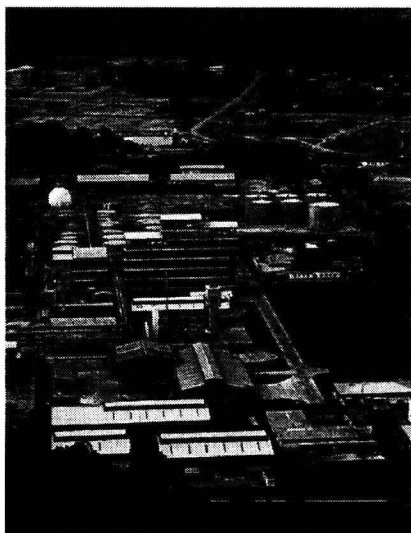
1. Merencanakan dan mengembangkan industri suatu prasarana yang diperlukan di daerah industri Pulau Batam berdasar rencana induk yang disetujui Presiden.
2. Menampung dan meneliti permohonan izin usaha yang diajukan oleh para pengusaha serta mengajukan kepada instansi yang berwenang guna memperoleh izin sesuai peraturan yang berlaku.
3. Mengawasi pelaksanaan projek-projek industri yang dibangun agar dapat berjalan dengan lancar dan tertib sesuai rencana.

Kemudian untuk lebih memperlancar peningkatan pembangunan Pulau Batam pemerintah pusat menyempurnakan Keppres No. 74 tahun 1971 dengan mengeluarkan Keppres No. 41 tahun 1973 yang lebih mempertegas pengelolaan daerah ini melalui suatu Badan yang disebut Otorita Batam, tugas lembaga ini antara lain:

- Mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Pulau Batam.

- Mengembangkan dan mengendalikan kegiatan pengalihan kapal di Batam.
- Menjamin agar tata cara perizinan dan pemberian jasa-jasa yang diperlukan dalam mendirikan dan menjalankan usaha di Batam dapat berjalan lancar dan tertib, segala sesuatunya untuk dapat menumbuhkan minat para pengusaha menanamkan modalnya di Batam.

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah tersebut akhirnya Batam berhasil tumbuh dan berkembang sebagai salah satu daerah industri yang maju dan sangat dinikmati oleh pencari kerja guna memperoleh pekerjaan yang lebih baik di daerah ini, sehingga dari tahun ke tahun pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh pendatang dari berbagai daerah dengan berbagai latar belakang menumpuk di sini.



Batamindo: Salah Satu Pusat Industri di Batam
(repro Profil Batam 2005)

Tingkat pertumbuhan ekonomi di Pulau Batam sangat berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengelola daerah industri tersebut, sebab tanpa adanya aturan yang jelas baik dari pemerintah pusat maupun daerah akan sangat berpengaruh terhadap

investor yang ingin menanamkan modalnya di daerah ini.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1999 pemerintah membentuk pemerintah Kota Batam dan seiring di berlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang menyebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengurus daerahnya sendiri.

Pada satu sisi hal itu sangat baik guna pembangunan daerah dan memperpendek jalur birokrasi pelayanan masyarakat, namun lain halnya dengan daerah Pulau Batam karena sebelumnya daerah ini merupakan dibawah pengelolaan Badan Otorita Batam yang memiliki kuasa dan kewenangan khusus di daerah ini. Oleh sebab itu tidak jarang terjadi tumpang tindih kewenangan dilapangan dan isu dualisme kepemimpinan karena masing-masing lembaga merasa lebih berkuasa dan berwenang.

Hal tersebut baik langsung atau tidak dapat merugikan iklim pembangunanj sebab masyarakat yang sebahagian besar merupakan penggerak ekonomi dan bisnis khususnya para investor merasa tidak nyaman dengan suasana tersebut, oleh sebab itu perlu adanya UU yang lebih tegas untuk mengatur kewenangan lembaga di daerah perbatasan ini.

Posisi Pulau Batam yang berada pada garis pertumbuhan Sijori (Singapura, Johor, Riau) sangat mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, apalagi didukung dengan kebijakan yang memacu semangat investor untuk menanamkan modalnya di daerah Pulau Batam sehingga tidak mengherankan jika Batam berkembang pesat.

Kontribusi Pulau Batam pada pembangunan nasional cukup besar. Investasi yang telah ditanamkan pemerintah sebesar (2 triliun telah kembali sekitar 4,4 triliun (30 %) dalam 5 tahun terakhir).

Dinamika eksport kumulatif sampai tahun 2001 mencapai US \$ 56 miliar, tahun 2002 eksport non migas mencapai US \$ 5,87 miliar dari pertumbuhan itu, Batam menyumbang devisa nasional hingga 9,6%. Pertumbuhan ekonomi Batam memiliki peran yang cukup besar sehingga tidak mengherankan jika pemerintah pusat tetap berupaya mengelola aset ekonomi daerah tersebut.

Dalam bidang kepariwisataan, Batam merupakan gerbang terbesar di Indonesia setelah Bali dan Jakarta, tidak kurang wisatawan

yang datang ke daerah ini mencapai 1 juta orang. Batam termasuk kawasan wisata yang memiliki berbagai objek baik itu alam, sejarah, budaya, pantai dan laut. Selain itu, daerah ini juga merupakan pusat perbelanjaan yang banyak menyediakan berbagai produk baik ekspor maupun impor.

Pertumbuhan angkatan kerja yang mampu diserap terus meningkat walau pun jumlah kedatangan para pencari kerja yang cukup besar belum mampu sepenuhnya ditampung, namun itu semua tidak lepas dari SDM pencari kerja yang sebahagian besar tanpa skill yang memadai tetapi berani bertarung nasib di Batam.

Sebagai pendukung dunia kepariwisataan, daerah ini memiliki berbagai jenis hotel dan restoran yang bertaraf Internasional dan nasional sehingga tidak mengherankan jika setiap hari kedatangan wisatawan selalu ada apalagi bila akhir pekan kedatangan wisatawan dari Singapura dan Malaysia jumlahnya meningkat tajam dibandingkan dengan hari biasa.

Sektor manufaktur di Batam merupakan kegiatan yang paling dominan hal itu terlihat dari Pendapatan Regional Bruto (PDRB) dimana sebesar 65% dikontribusikan dari sektor ini. Kemajuan dari sektor ini dimulai pada tahun 1980'an dimana para pengusaha dari Singapura melakukan relokasi usahanya di Singapura karena akibat kenaikan upah di sana terjadi secara terus menerus. Oleh sebab itu Batam menjadi salah satu daerah relokasi usaha mereka karena jaraknya yang dekat, dan tingkat upah pekerja masih terjangkau dan kompetitif.

Nilai ekonomi lainnya yang tak kalah pentingnya adalah volume angkutan minyak ke berbagai daerah dan hingga ke luar negeri posisi Batam sangat menguntungkan sehingga memudahkan jalur perdagangan. Sejak dahulu daerah ini merupakan basis logistik dan operasional usaha eksplorasi dan eksplorasi minyak lepas pantai tidak kurang 15 juta barel perhari berputar di sana dan di selat Malaka sekitar 10 juta barel setiap harinya.

Belakangan ini isu pemberlakuan *Free Trade Zone* (FTZ) begitu menggema, hampir seluruh elemen yang ada di Batam mengingingingkan terwujudnya FTZ agar investasi di daerah ini dapat lebih baik lagi, selama ini secara de facto FTZ sebenarnya telah berlaku namun belum ditetapkan melalui suatu undang-undang oleh sebab itu perjuangan

seluruh elemen di Batam untuk mewujudkan berlakunya FTZ terus dilakukan.

Bagi masyarakat Melayu di Batam dan Kepulauan Riau umumnya terhadap dinamika kehidupan ekonomi di Batam bukanlah menjadi hal baru apalagi jika dikaitkan dengan hubungan ekonomi antar negara sebab jauh sebelum pemerintah pusat dengan Otorita Batamnya membangun kawasan ini hubungan dengan Negara tetangga sudah berlangsung sejak dahulu.

Dalam hal partisipasi masyarakat tempatan (orang Melayu) terhadap pembangunan di pulau ini dalam gerak pembangunan semakin hari seakan tak terlihat hal itu karena daerah tersebut telah dibanjiri dan didominasi oleh kaum pendatang dari berbagai daerah sehingga etnis Melayu seakan tenggelam oleh ramainya budaya luar yang hadir di pulau ini.

Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 99 tentang otonomi daerah dan seiring di bentuknya pemerintah Kota Batam sedikit memberi warna daerah ini sebagai wilayah masyarakat Melayu apalagi dengan munculnya isu-isu putra daerah sedikit mengangkat etnis Melayu sebagai masyarakat tempatan.

4.2 Politik

Kondisi politik di Pulau Batam sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk daerah ini. Namun setelah diterapkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, situasi politik sangat berpengaruh pada kondisi lokal. Apalagi pada era reformasi ini muncul berbagai kepentingan tidak hanya bersifat kedaerahan tapi juga kepentingan pusat.

Campur tangan pemerintah pusat dalam pengembangan daerah ini sangat besar dan tak dapat dipungkiri bahwa majunya daerah ini berkat dukungan pemerintah pusat baik secara politik maupun ekonomi.

Melihat letak perbatasan ini yang sangat strategis memiliki potensi ekonomi yang tinggi berdampingan dengan pusat perdagangan dunia Singapura, pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk menerapkan daerah yang dahulunya pulau yang sepi dirancang menjadi pusat industri yang sangat terkenal tidak saja di dalam negeri tetapi sampai ke mancanegara. Keputusan pemerintah pusat yang paling berpengaruh

terhadap kemajuan daerah ini adalah dengan dikeluarkannya Keppres No. 74 tahun 1971 tentang pembangunan pulau Batam.

Selanjutnya Keppres tersebut disempurnakan lagi melalui Keppres No. 41 tahun 1973 tentang daerah industri Pulau Batam. Dalam Keppres ini disebutkan adanya kelembagaan Badan Pengawas dengan tugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengendalian pembangunan Pulau Batam yang dilakukan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.
- b. Mensinkronisasikan kebijakan instansi-instansi Pemerintah yang berhubungan dengan pengembangan Pulau Batam.
- c. Memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan kepada otoritas pengembangan Pulau Batam mengenai pengembangan Pulau Batam sebagai daerah industri sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah dibidang pembangunan.

Adapun susunan Badan Pengawas ini terdiri dari:

1. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Bapenas, sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota.
3. Menteri Keuangan sebagai Anggota.
4. Menteri Perdagangan sebagai Anggota.
5. Menteri Perindustrian sebagai Anggota.
6. Menteri Perhubungan sebagai Anggota.
7. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Anggota.
8. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau sebagai Anggota.

Selain membentuk Badan Pengawas daerah ini dibantu dengan kelengkapan lainnya guna memperlancar tugas dan wewenang seperti adanya Tim Asistensi yang terdiri dari berbagai departemen.

Seiring dengan laju pertumbuhan daerah ini pemerintah pusat terus melakukan monitoring, kemudian atas pertimbangan semakin meningkatnya kegiatan usaha, sementara itu kemampuan serta daya dukung terbatas maka dipandang perlu melakukan penambahan

lingkungan kerja, lalu di lakukan perluasan lahan dengan mengikutsertakan Pulau Rempang dan Galang sebagai kawasan berikat (*Bonded Zone*) melalui Keppres No. 28 tahun 1992 tentang penambahan lingkungan kerja.

Berbagai Keputusan yang dikeluarkan sebelum tahun 1998 merupakan produk pemerintah masa Orde Baru, sehingga nuansa kepentingan pusat melalui Badan Otorita sangat terasa dalam pembangunan daerah ini. Sementara pemerintah daerah pada waktu itu tidak dapat berbuat banyak untuk mengatur kebijakan di daerah itu.

Dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengamanatkan bahwa daerah diberi kewenangan yang lebih luas dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Tentu saja hal itu akan memberi dampak pada daerah ini karena di khawatirkan akan terjadi tumpang tindih kewenangan antara Badan Otorita Batam (BOB) dengan Pemerintah Kota Batam.

Disatu pihak pemerintah Kota Batam berpegang pada UU No. 22 tahun 1999 tetapi di pihak lain pemerintah pusat melalui BOB berpegang pada Keppres No. 41 tahun 1973 dan berbagai aturan pendukungnya.

Semangat otonomi begitu kuat menggema hampir di seluruh daerah termasuk di Pulau Batam, dimana daerah diharapkan dapat lebih banyak berbuat guna pembangunan di daerah. Sementara untuk daerah ini dimana BOB yang sebelumnya bagaikan penguasa tunggal tentu akan memicu ketimpangan yang bakal terjadi, untuk mengatasi hal tersebut kedua lembaga tersebut diharapkan dapat bersinergi dalam melaksanakan tugasnya apalagi dalam pembentukan kota Batam yang tercantum pada pasal 21 (ayat 1) menyebutkan bahwa "Dengan terbentuknya Kota Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah mengikutsertakan Badan Otorita Batam". Aturan tersebut guna menghindari 'pertarungan' dan tumpang tindih tugas-tugas mereka dalam rangka pembangunan di daerah tersebut.

Tahun 2000 pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, pemerintah pusat mengeluarkan Keppres No. 113 tahun 2000 tentang perubahan keempat atas Keppres No. 41 tahun 73 tentang daerah industri pulau Batam. Maksud dan tujuan di keluarkannya keppres ini sebenarnya cukup baik namun disisi lain harus dipahami

bahwa daerah ini merupakan wilayah otonomi pemerintah Kota Batam, bukankah sebaiknya hal-hal yang menyangkut pembangunannya melibatkan pemerintah daerah atau diserahkan sepenuhnya pada daerah tersebut untuk mengurus daerahnya. Pemerintah pusat melalui BOB cukup memberikan masukan pada pemerintah daerah agar dikeluarkan perda atau sejenisnya tanpa harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Karena sekali lagi dikhawatirkan jika hal itu terus berlanjut akan memicu 'pertarungan' kewenangan di lapangan antara daerah dan pusat.

Pemerintah Kota Batam yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki DPRD dan struktur pemerintahan sebagaimana pemerintah daerah lainnya di Indonesia walaupun untuk hal-hal tertentu ada pengecualian sesuai dengan kebijakan dan aturan-aturan yang mengatur keberadaan daerah.

Pemerintah Kota Batam yang telah dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 99 sedikit banyaknya telah mengangkat keberadaan masyarakat tempatan (suku Melayu) dan peran sertanya membangun Pulau Batam. Isu putra daerah mulai mencuat dalam roda pembangunan sehingga tidak mengherankan pada pemilihan walikota pertamanya terpilih Drs. H. Nyat Kadir putra daerah Kepulauan Riau yang terpilih melalui lembaga DPRD Kota Batam. Seiring dengan itu juga isu putra daerah muncul di berbagai kesempatan baik dalam dunia partai politik, kedudukan di pemerintahan maupun kesempatan untuk berusaha.

4.3 Sosial Budaya

Berbicara mengenai sosial budaya di kawasan perbatasan provinsi Kepulauan Riau termasuk Batam maka tak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial budaya masyarakat tempatan (etnis Melayu). Kehidupan etnis Melayu sudah mengakar di daerah ini, sehingga tidak mengherankan apabila nuansa etnik Melayu selalu ditampilkan sebagai icon kebudayaan Pulau Batam.

Batam yang awalnya kurang diperhatikan dan sepi dari aktifitas kehidupan, sekarang telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu pusat komunitas masyarakat yang datang dari berbagai daerah dengan bermacam corak dan latar belakang budaya yang berbeda-beda berkumpul dan seakan telah membentuk satu kehidupan baru di pulau Batam.



Pasar Tradisional di Batam: Arena Interaksi Antar Etnis

Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan terus meningkat disebabkan arus kedatangan para pencari kerja yang terus bertambah pada setiap tahunnya menimbulkan berbagai dampak sosial sebagai akibatnya. Munculnya berbagai kelompok kesukuan dan paguyuban dikhawatirkan dapat terjadi pertikaian antar etnik seandainya terjadi perselisihan antara anggotanya dan membawa permasalahan tersebut menjadi pertikaian antar kelompok etnik. Oleh sebab itu diharapkan kelompok-kelompok etnis tersebut dapat mengendalikan dan membina masing-masing masyarakatnya agar hidup rukun dan saling menghormati terhadap siapa saja dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di kota Batam agar kekhawatiran berbagai kalangan dapat dihindari karena di Pulau Batam pernah terjadi pertikaian antar kelompok etnis yang berakibat timbulnya banyak korban dari kedua pihak. Untuk itu peran dari tokoh masing-masing kelompok dapat melakukan sosial kontrol pembinaan bukan sebagai provokator yang merugikan banyak pihak hanya demi ego atau kepentingan-kepentingan tertentu.

Pulau Batam yang telah berkembang pesat dan menjadi daerah industri terkemuka bahkan terkenal hingga ke mancanegara terkesan menjanjikan segudang mimpi untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik padahal di balik itu terpendam segudang permasalahan sosial dan munculnya penyakit masyarakat sehingga tidak jarang di sini terdengar munculnya berbagai tindak kekerasan, pencurian, pencopetan dan lain-

lain setiap saat harus selalu di waspadai.

Pertumbuhan penduduk yang sangat drastis walau telah diantisipasi melalui perdaduk yang dilakukan oleh Pemko Batam, seakan tak mampu menahan laju pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung hingga saat ini, sehingga dampak dari permasalahan itu salah satunya adalah tumbuhnya ruli (rumah liar) yang menjamur bagaikan cendawan tumbuh. Hal itu terjadi karena mahalnnya harga rumah dan tingginya biaya kost walau hanya berukuran kecil sehingga mereka mencari jalan pintas dengan mendirikan ruli di lahan-lahan kosong yang sebenarnya telah melanggar aturan yang berlaku. Walau pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan ruli melalui penataan kota tapi tetap saja tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pulau Batam yang merupakan bagaian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah kawasan komunitas etnis Melayu, namun dengan kedatangan berbagai etnis ke daerah ini mengakibatkan masyarakat Melayu seakan terkikis oleh kehidupan multietnis. Tetapi bukan berarti Melayu terpendam karena dengan keberagaman etnis yang terjadi saat ini sebenarnya merupakan bukti dari ciri khas masyarakat Melayu yang selalu terbuka terhadap berbagai kaum pendatang ke daerah ini. Hal itu sebenarnya telah terjadi jauh sebelum Batam ini maju seperti sekarang.

Dalam riak kehidupan yang beragam, keberadaan etnis Melayu tetap dirasakan nuansanya pada setiap kesempatan dan perhelatan yang di gelar di daerah ini.

Bahasa Melayu masih digunakan oleh sebahagian besar masyarakat Melayu sebagai bahasa pengantar sehari-hari sesama mereka, apalagi yang berdiam di kawasan pesisir dan pulau-pulau sekitar kawasan Pulau Batam. Selain bahasa Melayu, penggunaan bahasa daerah lainnya seperti: Jawa, Batak, Minang dan etnis Tionghoa juga sering dipakai sebagai bahasa pengantar dalam kelompok masing-masing.

Pembangunan di Batam juga diiringi dengan penyediaan sarana dan prasarana sekolah dengan berbagai tingkatan sebagai kebutuhan akan pendidikan. Bahkan sudah tersedia sekolah tinggi dan Politeknik Batam sebagai sarana menuntut ilmu bagi anak-anak mereka yang berdiam di Pulau Batam.

Mengenai kehidupan beragama, di daeraah ini dapat dikatakan

cukup baik karena di daerah ini terdapat berbagai pemeluk agama seperti Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Sedangkan etnis Melayu sebagai masyarakat tempatan adalah merupakan pemeluk agama Islam dan dapat dikatakan mereka masih kuat berpegangan pada hukum dan ajaran-ajaran Islam sebagai mana pepatah yang terdapat bagi masyarakat Melayu yaitu “Adat Bersendikan Syara' dan Syara' Bersendikan Kitabullah”.

4.4 Kehidupan di Perbatasan

Kasus A

Alia (24 tahun), Melayu, bekerja sebagai staf resepsionis sebuah hotel di kawasan Nagoya. Orang tuanya tinggal di Tanjungpinang. Sudah empat tahun bekerja di Batam selepas SMA.

Alia mengaku sering bepergian ke Singapura atau Johor untuk berbelanja. Namun, diakuinya juga, ia sama sekali belum pernah pergi ke Jakarta. Katanya, bahkan ia kurang tertarik untuk pergi ke Jakarta dengan alasan, orang Jakarta sendiri lebih suka pergi ke Singapura.

Sementara dalam hal lain, pilihan menonton televisi, misalnya, Alia mengaku juga lebih suka menyetel stasiun negara tetangga, terutama televisi berbahasa Melayu, karena alasan bahasa yang mudah dipahami. Untuk gaya berpakaian, Alia juga memilih berkiblat pada gaya berpakaian negeri tetangga yang dikenal maju tersebut. Tentu saja ini orientasi dalam hal konsumsi.

Lalu, apa tanggapannya kebijakan pemerintah Indonesia di perbatasan.

“Saya orang Indonesia. Itu yang tertera dalam KTP dan Paspor saya. Tapi saya juga adalah orang Kepulauan Riau, yang merasa lebih dekat dengan Malaysia dan Singapura daripada Jakarta. Orang tua saja di Tanjungpinang banyak memiliki kerabat yang tinggal di dua negara tetangga tersebut. Sejak kecil saya terbiasa mengkonsumsi barang-barang dari kedua negara tersebut. Malah, hingga sekarang ibu saya tetap bertahan pada pilihan barang-barang dari luar daripada barang dalam negeri yang katanya kualitasnya kurang bagus. Kadang-kadang saya

menganggap pemerintah Indonesia tidak mempedulikan kami yang tinggal di Kepulauan Riau. Bayangkan saja, gula dan beras yang kita konsumsi dari dulu itu kan dari luar, masa sekarang dilarang. Sedangkan harga beras dan gula dalam negeri sangat tinggi. Akibatnya kita jadi susah. Kita ini kan lebih dekat ke Singapura dan Malaysia, apa salahnya kita mengkonsumsi barang dari negara mereka. Itu juga yang kita lakukan sejak dulu. Bila kita harus bergantung pada barang dari dalam negeri, lama-kelamaan kita bisa bangkrut. Batam itu jauh dari Jawa, sehingga ongkos transportasi pun tentu mahal, membuat harga barang jadi berlipat ganda.”

Alia tidak sendiri. Ada banyak informan lain yang mengungkapkan hal senada. Seringkali kebijakan pemerintah pusat di Jakarta dianggap kurang memperhatikan masyarakat yang tinggal di perbatasan.

Salah satu contoh yang patut dikemukakan dalam kasus ini adalah naiknya harga BBM (bahan bakar minyak). Seringkali di wilayah perbatasan, tidak hanya Batam, harga minyak tanah eceran misalnya menjadi naik dua kali lipat dari harga resmi. Pedagang mengatakan hal tersebut karena kelangkaan minyak yang disebabkan oleh kurangnya pasokan minyak ke daerah ini. Seakan-akan jarak yang jauh dari pusat pemerintahan kemudian menjadi legitimasi bagi para pedagang untuk menaikkan harga barang setinggi-tingginya. Yang menerima dampaknya tentu saja masyarakat menengah ke bawah, karena hanya mereka sangat bergantung pada minyak tanah sebagai bahan bakar sehari-hari. Juga para pedagang kecil, seperti pedagang makanan keliling yang menjual bakso, soto, dan makanan-makanan yang harus dimasak dengan kompor minyak tanah.

Kasus B

Wati (42 tahun), sudah dua tahun ini ia bekerja di Singapura sebagai pegawai restoran secara ilegal. Ia menggunakan visa bebas selama dua minggu (pemegang paspor Kepulauan Riau memperoleh visa bebas selama dua minggu untuk kunjungan ke Singapura dan satu bulan untuk kunjungan ke Malaysia). Setelah dua minggu ia kembali ke

Batam, istirahat seminggu atau dua minggu, kemudian masuk ke Singapura lagi. Menurutnya, ini pekerjaan yang menyenangkan karena penghasilannya jauh lebih besar dibandingkan jika ia bekerja di Batam. Tapi memang harus berhati-hati agar tidak tertangkap polisi Singapura.

Pekerjaan yang dijalani oleh Wati juga banyak dijalani oleh warga perbatasan lain. Seperti Nita (28 tahun) yang sesekali masuk ke Singapura untuk menjadi pemijat. Biasanya ia tinggal di Singapura selama seminggu di sebuah hotel langganannya. Nanti kontakannya di Singapura akan mencarikannya pelanggan. Tapi berbeda dengan Wati, Nita hanya sesekali melakukan pekerjaan ini.

Menurut penuturan beberapa informan, banyak juga pekerja seks komersial yang masuk ke Singapura untuk mendapatkan penghasilan lumayan. Biasanya mereka ini terorganisir rapi dan beroperasi di hotel-hotel di Singapura.

Selain Singapura, Malaysia adalah juga tujuan untuk bekerja secara illegal. Hal ini disebabkan oleh mudahnya bepergian ke negara tetangga tersebut. Ini juga diakibatkan oleh kurangnya lapangan kerja yang bisa membayar layak para pekerjanya. Banyak buruh yang bekerja di industri-industri menerima upah yang nyaris tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari selama sebulan, terutama dengan naiknya harga-harga barang di pasaran yang tidak diimbangi oleh naiknya upah bulanan mereka. Sementara jam kerja mereka sangat panjang, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk melakukan pekerjaan sampingan agar memperoleh penghasilan tambahan.

Masalah-masalah ini sangat khas ditemui di Batam, sehingga menyebabkan orang-orang yang memiliki keberanian mencoba untuk mengadu nasib di negara tetangga. Bahkan, ada yang sudah melakukannya selama bertahun-tahun.

Salah seorang informan, Jaka (28 tahun) yang berasal dari pekanbaru mengatakan ia telah enam tahun bekerja sebagai pedagang kurma di Singapura. Agar bisa lebih sering berada di Singapura ia membuat empat paspor dari berbagai tempat di Kepulauan Riau, sehingga pihak imigrasi tidak curiga seringnya ia bepergian ke Singapura.

Jaka bekerja dengan beberapa teman lain dengan mamakai metode sama. Lama tinggal bebas visa di Singapura selama dua minggu benar-benar dimanfaatkannya untuk mencari uang. Setelah itu ia kembali

ke Batam untuk istirahat selama beberapa hari. Kadang selama beberapa minggu jika keadaan di Singapura sedang tidak memungkinkan, misalnya sedang banyak razia.

Begitu seterusnya dilakukan oleh Jaka dan teman-temannya selama bertahun-tahun. Ia merasa beruntung selama ini tidak pernah mendapat masalah dengan imigrasi maupun polisi di Singapura. Ia pun mengajak beberapa teman lagi dari daerah asalnya untuk bekerja dengannya di Singapura.

Kasus C

Perbatasan merupakan wilayah yang sangat terbuka, seperti telah disinggung di atas. Oleh karena itu, warganya pun tidak hanya terdiri dari warga negara setempat tapi seringkali juga warga negara tetangga.

Dengan pembukaan pusat-pusat Industri seperti Batamindo di awal tahun 90-an, semakin banyak orang Singapura yang masuk ke Batam. Mereka membeli rumah, ruko (rumah toko), maupun property lainnya seperti tanah dan bangunan-bangunan untuk kegiatan ekonomi.

Orang Singapura merupakan pasar potensial bagi industri perumahan mewah berkonsep resort di Batam, karena inilah kesempatan untuk memiliki rumah nyaman berharga murah (diukur dari kurs dollar) yang sulit mereka miliki di negara mereka.

Ani (24 tahun), mantan pramuria di sebuah bar karaoke. Telah dua tahun ini ia menjadi pasangan Mr. Chou, seorang warga Singapura. Ani tinggal di sebuah kawasan elit di sebuah rumah besar dan mewah yang dibeli kekasihnya yang selalu datang setiap akhir minggu. Selain Ani, ada banyak perempuan-perempuan lain yang memiliki kisah serupa. Mereka memiliki kekasih orang Singapura yang datang mengunjungi mereka setiap akhir minggu. Para kekasih ini sering disebut dengan istilah 'penjamin' karena mereka memberikan jaminan keamanan berupa biaya hidup setiap bulannya termasuk untuk tempat tinggal. Ani mengaku sebenarnya ia ingin bisa menikah resmi dengan kekasihnya itu. Masalahnya, kekasihnya itu telah memiliki isteri di Singapura, sehingga tidak mungkin ia bisa menikah resmi. Di samping itu, ia sendiri merasa ragu apakah kekasihnya itu memang berniat untuk menikahinya. Namun, dengan hidup yang tercukupi segalanya seperti ini pun, Ani pun merasa sudah cukup puas. Setiap kali pulang ke kampungnya di Jawa, ia

bisa menunjukkan bahwa ia telah berhasil di Batam. Ia selalu mengatakan pada kerabat atau teman-temannya kalau ia isteri orang Singapura. Sesekali ia pun pergi ke Singapura untuk berbelanja, namun tidak pernah bersama kekasihnya.

Untuk sebagian perempuan pekerja seks komersial, memiliki penjamin adalah sebuah tahapan yang jauh lebih baik. Karena mereka hanya melayani satu laki-laki saja, itupun hanya sesekali, dan mereka tidak perlu lagi memikirkan biaya hidup sehari-hari. Bahkan, ada kecenderungan di antara mereka untuk mencari laki-laki yang potensial untuk bisa dijadikan 'penjamin', yaitu laki-laki yang memiliki kantong tebal, tidak peduli berapapun usianya. Sebagian wisatawan Singapura yang mencari hiburan sek memang bukan orang-orang muda. Sebagian di antara mereka malah berusia di atas lima puluh tahun, sehingga ada sebutan 'apek-apek Singapura', kata 'apek-apek' adalah sebutan untuk kakek-kakek. Biasanya mereka ini adalah orang-orang yang sudah pensiun.

Bagi orang Singapura sendiri, Batam menjadi tempat melepas lelah dari tekanan kerja selama seminggu penuh. Hal ini dapat terlihat pada aktivitas akhir minggu di tempat-tempat hiburan maupun hotel-hotel di seluruh Batam. Tingkat hunian hotel di akhir minggu nyaris mencapai 100%, bahkan untuk waktu-waktu tertentu orang akan kesulitan mendapatkan kamar hotel di akhir minggu jika tidak mememesannya jauh-jauh hari sebelumnya. Tempat-tempat hiburan pun penuh. Sebagian besar para tamunya adalah orang-orang Singapura yang berakhir minggu.

Robert (32 tahun) seorang pegawai bank di Singapura mengatakan hampir setiap akhir minggu selalu dihabiskannya di Batam. Ia memiliki langganan sebuah hotel mewah di bilangan Nagoya. Kadangkala ia menginap di resort yang berada di pantai Barat Batam, tempat ia bisa bermain golf atau *diving*. Selama beberapa hari di Batam, ia hanya bersenang-senang, ke karaoke, ke pub, atau main golf. Kadangkala ia ditemani oleh seorang perempuan yang menurut penuturannya adalah temannya. Perempuan ini bekerja di sebuah bar karaoke.

Menurut Robert, Batam memberikan rasa 'bebas' yang tak ditemuinya di Singapura. Di Singapura segala sesuatunya teratur rapi, yang kadang terasa begitu menekan. Sementara di Batam, ia merasa

seperti menghirup udara bebas. Apapun bisa dilakukan untuk mendapatkan kesenangan, syaratnya hanya satu, uang. Dan bagi orang seperti Robert uang tidak menjadi masalah. Apalagi dengan nilai tukar dollar Singapura terhadap rupiah terus saja naik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan para wisatawan Singapura ini yang paling dominan adalah mencari hiburan seks murah. Ini tidak pernah surut meskipun kampanye bahaya HIV/ AIDS telah digembargemborkan selama bertahun-tahun. Bukannya mereka tidak menyadari itu, terlebih Batam telah dikenal secara internasional menjadi daerah yang rawan bahaya penyakit mematikan yang belum ada obatnya itu. Untuk alasan mengurangi risiko terjangkit penyakit inilah sebenarnya mengapa banyak di antara orang Singapura memilih menjalin hubungan sementara dengan pasangan tetap seperti kasus Ani. Bahkan di beberapa tempat ada kos-kosan yang tergolong mewah yang khusus untuk 'isteri-isteri' orang Singapura ini. Atau rumah-rumah di perumahan mewah. Dengan hanya berhubungan dengan pasangan tetap ini dianggap dapat mengurangi risiko terjangkit virus HIV/ AIDS. Untuk menjaga agar pasangannya juga tidak berhubungan dengan orang lain, mereka memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari dari tempat tinggal, makan, pakaian, dan kebutuhan lainnya.

Robert juga mengatakan bahwa di Batam mereka juga bisa mendapatkan obat-obatan seperti ekstasi dengan mudah dan relatif murah. Obat-obatan ini dengan mudah bisa mereka peroleh di hampir semua tempat hiburan di Batam. Sementara di Singapura pengonsumsi obat-obatan ini jika tertangkap polisi akan mendapat hukuman yang berat. Di Batam, sepertinya mereka jarang berhadapan dengan aparat penegak hukum. Pendek kata, untuk mencari kesenangan, Batamlah tempatnya.

Fani (32 tahun) berbeda dengan Robert. Minimal sebulan sekali ia pergi ke Batam. Tetapi tujuannya bukan hanya untuk berlibur semata-mata, tetapi ia juga berbelanja. Fani memiliki sebuah butik kecil di Singapura yang menjual barang-barang kerajinan dari nusantara. Kunjungannya ke Batam adalah dalam rangka membeli barang dagangan untuk dijual di butiknya. Ia merasa perlu datang sesering mungkin ke Batam untuk melihat perkembangan produk-produk baru. Barang-barang kerajinan itu dibelinya dengan harga murah di Batam dan

dijualnya dengan standar harga di Singapura. Menurut penuturannya keuntungan yang diperolehnya cukup lumayan.

Bisnis kerajinan barang-barang dari nusantara yang masuk ke Batam ini sedang mendapat tempat di pasar Singapura karena segala hal yang berbau tradisi sedang menjadi trend di sana. Di Batam sendiri ia sudah memiliki pemasok tetap. Orang inilah yang mencari barang dari berbagai tempat di Indonesia yang memiliki kekhasan yang sudah terkenal seperti Bali, Jawa, Kalimantan, atau Sumatera.

Untuk hiburan, Fani berpendapat, sebagian besar tempat hiburan sepertinya hanya untuk laki-laki saja. Ia mengaku kalau ingin refreshing di Batam yang dikunjunginya hanyalah tempat-tempat yang menyediakan perawatan wajah dan tubuh, seperti spa-spa yang kini banyak di temui di sudut-sudut kota Batam. Selebihnya, seperti tempat hiburan lain, bar karaoke misalnya, hanya dikunjunginya kalau sedang bersama teman-teman lain. Karena di tempat-tempat ini jarang perempuan pergi sendiri.

BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Bagi orang Melayu di Kepulauan Riau, masa lalu sama pentingnya dengan masa kini dan masa depan, bahkan dinggap paling penting. Bukan hanya pada wilayah individual semata, terlebih juga pada masa lalu kolektif. Masa lalu kolektif bagi orang Melayu adalah masa kesultanan. Apa yang terjadi pada masa kesultanan merupakan yang kuasanya melingkupi kehidupan di masa-masa selanjutnya. Meskipun masa ini sudah terjadi berabad-abad lalu, dan bahkan hanya menyisakan puing-puing istana lama dan kisah tragis keruntuhannya. Namun, yang kekal menjadi semangat yang berkuasa di masa kini adalah kisah kejayaan kesultanan. Setidaknya itu yang tertangkap pada sebagian orang Melayu, terutama yang tinggal di dekat pusat pemerintahan masa lalu seperti di Tanjungpinang, atau secara khusus Penyengat.

Menariknya, meskipun masa lalu kolektif itu tidak dialami langsung, namun ingatan mengenainya dapat lestari pada generasi-generasi berikut. Seakan-akan mereka sendiri memang mengalaminya langsung. Padahal pelestarian ingatan komunal ini pun tidak melalui proses formal dan disengaja. Bahkan, sebagian besar juga tidak melibatkan referensi literatur. Namun, ingatan itu dapat bertahan nyaris dalam versi yang baku, melintasi masa-masa kemudian.

Salah satu media pelestari ingatan komunal itu adalah bincang-bincang santai di kedai kopi (lihat Sita Rohana, 2003). Dalam satu hari, minimal sekali mereka (terutama laki-laki) datang ke kedai kopi untuk bersembang dengan para sahabat dan teman. Obrolan ini dapat berlangsung hingga beberapa jam. Dengan topik yang beragam. Dari pengamatan terlibat, sesekali tercetus sebuah kisah yang terjadi masa kesultanan, apakah itu hanya sebagai referensi atau memang sengaja dikisah-ulang.

Dan, memang untuk kisah-kisah masa lalu kesultanan, orang Penyengat memang tidak ada tandingannya. Terutama jika kisah itu seputar kehidupan para penguasa, dari sudut pandang orang-orang yang berada di dekatnya, secara fisik maupun batin. Sementara di lingkaran

bagian luar terdapat orang-orang Melayu yang terbagi dalam dua kelompok besar, berdasarkan ingatan komunal mereka. Pertama, mereka yang memiliki kisah masa lalu kesultanan sejalan dengan mereka yang berasal dari Penyengat. Kedua, mereka yang memiliki versi lain yang berbeda dengan versi Penyengat.

Ingatan komunal inilah yang kemudian menjadi pusat imajiner bagi orang Melayu di masa kini. Artinya, kini ketika mereka tidak lagi berada di masa kesultanan, melainkan pada masa negara-bangsa Indonesia, yang semestinya menjadi pusat kehidupan mereka, jauh di dalam lubuk hati dan ingatan mereka masih ada pusat lain, yang dapat dikatakan lebih berkuasa daripada pusat yang secara politis dan administratif memiliki kekuasaan formal atas mereka.

Bersumber pada ingatan komunal ini pula, kedekatan dengan dua negara tetangga yang pada masa kesultanan merupakan satu wilayah di bawah kedaulatan yang sama berabad lampau. Banyak yang mengatakan bahwa kedekatan dengan Singapura maupun Malaysia adalah karena faktor kekerabatan. Memang, banyak kerabat orang Melayu yang tinggal di Tanjungpinang ini tinggal di dua negara jiran tersebut. Orang Melayu yang ada di kedua negara tersebut pun bertutur dalam bahasa yang sangat serupa, jika pun dibandingkan dengan orang Melayu di Riau daratan yang secara politis masih satu negara. Namun, kesamaan lain yang sangat penting adalah pada ingatan komunal yang mengacu pada masa kesultanan, dari masa Johor, Riau-Lingga, dan Penyengat. Inilah yang mendasari eratnya hubungan sosio-kultural tiga wilayah berbeda negara tersebut.

Bukti-bukti yang dapat diajukan untuk mendukung hal tersebut adalah masih eratnya hubungan emosional dengan pusat pemerintahan lama, Penyengat. Ditunjukkan dengan banyaknya pengunjung orang Melayu dari dua negara tetangga ke pulau yang menyimpan situs sejarah masa kesultanan dan hubungan akademis dengan kedua negara dalam berbagai tinjauan sejarah. Sebuah lembaga yang bergerak dalam pewarisan sejarah Penyengat, Balai Maklumat, misalnya memiliki hubungan dan kerjasama lebih banyak dengan dua negara tetangga, juga negara Melayu serumpun lain seperti Brunei, dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang ada di negeri sendiri.

Dalam perjalanan sejarahnya, ikatan imajiner dengan negara-

negara serumpun tersebut tetap bertahan sekalipun dihempas oleh berbagai kebijakan pemerintah pusat. Hubungan diplomatis dengan negara tetangga yang kurang baik karena adanya konfrontasi tahun 60-an misalnya. Keinginan Sukarno, presiden Republik Indonesia pada masa itu, untuk menjadikan Malaysia (Singapura masih menjadi bagian Malaysia), juga bersumber pada ingatan komunal masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Meskipun pemecahannya telah dimulai pada masa kolonial. Malaysia dan Singapura berada di bawah kekuasaan Inggris dan Kepulauan Riau menjadi daerah kekuasaan Belanda. Pembagian kekuasaan yang dikukuhkan dalam Traktat London di awal abad ke-19 inilah yang kemudian diacu sebagai batas wilayah kekuasaan pemerintah negara Indonesia yang baru dibentuk. Dikatakan bahwa wilayah Indonesia adalah bekas daerah jajahan Belanda. Berdasarkan acuan ini, maka Malaysia dan Singapura tidak menjadi bagian wilayah Indonesia.

Berikut ini adalah gambaran mengenai daya tahan ikatan imajiner terhadap berbagai pergolakan politik:

Masa Kolonial

Seerti disinggung di atas, wilayah kesultanan terpecah pertama kali pada masa kolonial. Namun, seperti telah dibahas di atas penegasan perbatasan antara wilayah kekuasaan Hindia Belanda dengan Inggris ternyata tidak mempengaruhi kehidupan masyarakat di kedua wilayah yang kemudian terpisah. Hubungan sosial ekonomi masih saja berlanjut meskipun di bawah pengawasan ketat. Buktinya, pada masa pemerintahan Belanda, hubungan dagang antara berbagai daerah yang berada di bawah kekuasaan Belanda seperti Jambi dan Kepulauan Riau sendiri tetap berlangsung, meskipun sembunyi-sembunyi. Batam sendiri merupakan pasar gelap bagi barang-barang dari Sumatera daratan maupun dari Singapura.

Bahkan di masa kolonial, perdagangan lintas-batas ini menjadi sumber ekonomi andalan untuk membiayai perang melawan penjajah Belanda. Seperti Jambi misalnya, mereka melakukan perdagangan dengan Singapura, sebagian melalui Batam. Dari Jambi mereka menjual hasil bumi seperti kelapa ke Singapura dan membawa kembali barang kebutuhan lain. Begitu pula dengan pulau-pulau di seluruh Kepulauan Riau. Hal ini disebabkan, Belanda tidak berhasil menjadikan

Tanjungpinang sebagai pelabuhan dagang seperti Singapura. Akibatnya, banyak warga yang tinggal di Kepulauan Riau lebih memilih untuk berdagang di pasar Singapura, meskipun harus dengan sembunyi-sembunyi. Bila ditelusuri dari istilah yang berkembang hingga saat ini untuk menyebut para penyelundup yaitu, *smokkel*, dengan mudah kita akan mengetahui bahwa awal perkembangannya adalah pada masa penjajahan Hindia Belanda, karena kata itu merupakan kata bahasa Belanda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, penyelundupan di Kepulauan Riau memiliki akar sejarah yang panjang, sejak zaman Belanda. Jadi bukan fenomena yang baru saja muncul, melainkan sudah berumur ratusan tahun. Fenomena ini muncul karena pengaruh kebijakan penguasa yang berdampak pada aspek ekonomi. Yaitu antara ketatnya aturan yang diterapkan penguasa dalam mengatur ekonomi warganya, sementara tidak jauh dari tempat mereka, sebuah kesempatan untuk memperoleh keuntungan besar sedang menunggu.

Begitu pula dengan hubungan politis. Ketika Kesultanan Melayu Riau mulai terpojok oleh kekuasaan Belanda, mereka pun melakukan aliansi dengan kekuasaan di Singapura yang adalah juga masih terhitung satu akar, dari keturunan yang sama.

Bahkan ketika Sultan Riau terakhir dipecat Belanda dan terancam akan dipenjara, tempat tujuannya melarikan diri adalah Singapura. Begitu pula pada masa awal masuknya Riau ke dalam kekuasaan negara Indonesia. Ada semacam gerakan yang ingin menghidupkan kembali kejayaan Kesultanan di Riau dengan menjalin aliansi dengan kerabat-kerabat mereka yang berada di Singapura. Seandainya sekarang hubungan dengan Singapura kembali hangat, itu hanyalah kelanjutan dari apa yang ratusan tahun lampau berlangsung. Meskipun harus dibedakan bahwa kedekatan ini bukan dalam konteks politis. Artinya, jika Singapura dengan Kepulauan Riau itu bukan karena Kepulauan Riau adalah bagian dari negara Indonesia, melainkan karena Kepulauan Riau itu sendiri, sebagai sebuah wilayah yang memiliki benang merah sejarah dengan Singapura, juga dengan Malaysia.

Masa Kemerdekaan

Eratnya ikatan sosial ekonomi pada negara tetangga begitu terasa pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia. Penegasan wilayah

perbatasan, yang berarti juga pemutusan hubungan sosial ekonomi kedua negara berdampak pada runtuhnya ekonomi di kawasan perbatasan. Hal ini merupakan bukti bahwa selama ini kehidupan ekonomi kawasan ini lebih tergantung pada negara tetangga dibandingkan dengan negara sendiri.

Masa-masa pasca konfrontasi memutar-ulang apa yang terjadi pada masa kolonial Belanda. Penyelundupan banyak terjadi, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat karena pasokan bahan kebutuhan dari dalam negeri belum lancar.

Memasuki tahun 80-an, kebekuan hubungan dengan negara tetangga pun mencair, dengan direalisasikannya kerjasama tiga negara (Sijori). Kerjasama ini seperti mengembalikan wilayah serumpun ini ke masa yang telah lama berselang, masa kesultanan, ketika ketiga negara ini masih berada di bawah payung kekuasaan yang sama, Kesultanan Melayu.

Hubungan sosial budaya, ekonomi, dan politik mulai membaik. Kerjasama ini menjadikan kawasan perbatasan Indonesia, khususnya Batam, menjadi pusat industri dan ekonomi baru. Pulau ini pun kemudian menarik banyak pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Arus lintas-batas barang dan orang mulai terbuka lebar.

Namun, hubungan tiga negara ini pun mengalami pasang-surut. Perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antara tiga negara ini adalah salah satu pemicunya. Adanya kemudahan dalam melakukan perjalanan ke negara tetangga membuat banyak warga perbatasan menyeberang untuk mengadu nasib di negara tetangga. Kemudian, ketika kondisi ekonomi Indonesia makin memburuk, banyak pencari kerja dari berbagai daerah menyerbu Batam atau mencoba bekerja ke negara tetangga. Semakin lama semakin banyak yang datang. Keinginan untuk menangguk dollar dari negara tetangga kadang membuat orang memakai jalan pintas. Akibatnya, banyak imigran gelap yang menyelundup ke negara tetangga tanpa dokumen. Lalu muncul berbagai masalah dengan tenaga kerja illegal ini, yang kemudian membuat hubungan politis kembali menegang. Seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir ini antara Indonesia dengan Malaysia. Pemulangan TKI illegal besar-besaran tidak hanya menunjukkan betapa lemahnya pengawasan di perbatasan terhadap arus lintas-batas, tetapi juga menunjukkan begitu

buruknya kondisi ekonomi negara Indonesia, sehingga banyak penduduknya harus mengadu nasib ke negara tetangga.

Dampak lain, dari ketimpangan pertumbuhan ekonomi tiga negara ini adalah, meningkatnya prostitusi di wilayah perbatasan. Salah seorang informan mengatakan bahwa Batam merupakan lokalisasi terbesar di Kepulauan Riau. Dengan jumlah pekerja seks komersial (PSK) diperkirakan mencapai angka ribuan. Pulau ini memang kemudian dikenal sebagai tempat berakhir-minggu wisatawan dari negara tetangga. Dan, salah satu tujuan utama wisatawan ini berkunjung ke pulau ini adalah untuk konsumsi seks murah. Soal murah ini pun kembali pada nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap mata uang asing, termasuk dollar Singapura.

Sementara itu, pertumbuhan industri di Batam pun dalam beberapa tahun terakhir ini mulai mengalami penurunan, terlebih sejak pengalihan pengelolalan wilayah dari Otorita Batam kepada pemerintah daerah setempat. Iklim investasi asing sepertinya tidak kondusif untuk memacu pertumbuhan industri-industri baru. Banyak industri yang gulung tikar atau mengurangi produksinya, menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Ini merupakan masalah besar yang hingga saat ini dihadapi Batam.

Sebagai wilayah perbatasan, dapat dikatakan Batam sedang mengalami pemiskinan dalam berbagai aspek, baik ekonomi maupun moral. Sektor ekonomi formal nyaris tidak dapat diharapkan untuk menghidupi warganya, sedangkan ekonomi informal yang dapat bertahan dalam hempasan ketidakpastian kondisi ekonomi nasional hanyalah prostitusi.

Di Antara Dua Pusat

Dalam konteks diskusi mengenai perbatasan, Batam, merupakan salah satu contoh dimana wilayah perbatasan merupakan arena pertarungan kepentingan. Seperti dikemukakan sebelumnya, Batam pada mulanya dikembangkan sebagai pusat ekonomi baru, yang rencananya ditujukan untuk mengimbangi Singapura. Pembangunan pulau ini diarahkan menuju cita-cita itu. Mulanya, memang perkembangannya mengarah pada rancana semua. Namun, dengan semakin meningkatnya migrasi, terpuruknya ekonomi nasional,

kurangnya perencanaan dalam pengembangan wilayah lebih lanjut, serta pembangunan yang mengabaikan aspek keberlangsungan jangka panjang membuat rencana ini tak kunjung terealisasi.

Niatan semua ingin menjadikan Batam sejajar dengan Singapura sebagai pusat ekonomi di Asia Tenggara tak kunjung terlaksana. Hingga sekarang Batam tetap hanyalah hinterland bagi Singapura.

Jika dilihat dari kepentingan pusat, barangkali keberadaan Batam masih tetap memiliki nilai ekonomi sebagai penghasil devisa negara. Tapi bagi warga setempat, banyak kebijakan pemerintah pusat yang membuat kehidupan mereka yang sulit menjadi semakin sulit. Salah satu contoh adalah ketika pemerintah menetapkan pajak tinggi terhadap barang-barang dari luar, termasuk kebutuhan pokok. Masyarakat menjerit karena selama ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka mengandalkan barang dari luar karena harganya lebih murah daripada barang dari dalam negeri. (Barang-barang dari dalam negeri memang cenderung memiliki harga lebih tinggi karena ongkos transportasi pengangkutan hingga ke pulau ini). Ini tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, kondisi ini justru semakin menyuburkan praktik penyelundupan.

5.2 Rekomendasi

Bagaimanapun, wilayah perbatasan semestinya tidak diperlakukan sama dengan wilayah lain, karena wilayah ini memiliki kondisi unik. Inilah yang perlu dipertimbangan oleh pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan di wilayah perbatasan.

Faktor jarak yang relatif jauh dari pusat pemerintahan membuat wilayah perbatasan menjadi relatif jauh juga dari pengawasan. Lebih dari itu, faktor ini berjalan beriring dengan kedekatannya pada negara lain. Akibatnya, wilayah perbatasan pun menjadi wilayah yang rawan dalam konteks penjagaan kedaulatan negara. Apalagi dengan kurangnya perhatian pada kebijakan ekonomi, seperti kasus yang terjadi di Batam, kerawanan ini menjadi semakin berlipat. Terbukti dengan banyaknya warga perbatasan yang menyeberang ke negara tetangga untuk mencari kerja secara ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Andaya, Barbara Watson

1997 “*Recreating a Vision Daratan and Kepulauan in Historical Context*” dalam *Bijdragen Tot De Taal-, Land-en Volkenkunde*. 153:483-508.

Boggs, S.W.

1940 *International Boundaries: A Study of Boundary Functions and Problems*. New York: Columbia University Press.

Djalal, Hasjim

2005 “*Rawannya Batas Negara Kita*”, dalam *Tempo* edisi khusus 17 Agustus 2005.

Lufti, Muchtar, dkk.

1977 *Sejarah Riau*. Pekanbaru: Percetakan Riau.

Martinez, O.J.

1994 *Border People: Life and Society in the U.S.-Mexico Borderlands*. Tucson: University of Arizona Press.

Mubyarto

1993 “*Pendahuluan*”, dalam Mubyarto (ed.), *Riau Menatap Masa Depan*. Yogyakarta: Aditya Media.

1997 “*Riau: Progress and Poverty*”, dalam *Bijdragen Tot De Taal-, Land-En Volkenkunde*. 153:542-556.

Tirtosudarmo, Riwanto

2002 “*Tentang Perbatasan: Sebuah Pengantar*”, dalam *Antropologi Indonesia*. Th. XXVI, No. 67 Jan-Apr. Jakarta: Fisip-UI dan YOI.

Vivienne, Wee

1985 *Hierarchies of Being in Riau*, disertasi Doktor (Ph. D.) di

Australian National University, Australia.

Wadley, Reed L.

2002 “*Border Studies Beyond Indonesia*”, dalam *Antropologi Indonesia*. Th. XXVI, No. 67 Jan-Apr. Jakarta: Fisip-UI dan YOI.

Winoto, Gatot

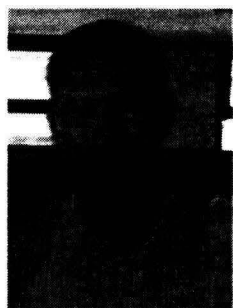
2000 *Perjuangan Masyarakat Kepulauan Riau dalam Mewujudkan Status Provinsi*. Tanjungpinang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

BIOGRAFI PENULIS



SITA ROHANA, lahir di Yogyakarta 4 Oktober 1973. Memperoleh gelar Sarjana Antropologi dari Fakultas Sastra-Universitas Gadjah Mada pada tahun 1997 dan gelar Magister Humaniora Jurusan Antropologi pada Universitas yang sama tahun 2003. Bekerja di Balai Kajian Sejarah (BKSNT) Tanjungpinang sejak tahun 1998. Ia aktif menulis artikel di media massa lokal maupun jurnal ilmiah nasional tentang masalah sosial budaya. Selain

melakukan penelitian kebudayaan, ia juga menerjemahkan karya ilmiah dan sastra. Beberapa karya ilmiah yang pernah diterjemahkannya telah diterbitkan oleh P2KK-UNRI yaitu *Untaian Kata Leluhur: Marginalitas, emosi dan kuasa kata-kata magi di kalangan orang Petalangan, Riau*, terbit pada tahun 2005 (diterjemahkan dari disertasi Yonhee Kang, berjudul *Words of the Ancestors, Words for Survival: Marginality, emotions, and power of magical words among the Petalangan of Riau*, Yale University, USA, 2000) dan *Pusat Kekuasaan Ganda: Masyarakat dan Alam Siak dan Sumatra Timur, 1674-1827*, terbit pada tahun 2006 (diterjemahkan dari karya Timothy P. Barnard, berjudul *Multiple Centres of authority: Society and environment in Siak and eastern Sumatra, 1674-1827*, Leiden: KITLV Press 2003).



ZULKIFLI HARTO, Zulkifli Harto, lahir di Langkat, Sumatera Utara, pada 9 Januari 1969. Ia mendapatkan gelas Sarjana Sastra dari Fakultas Sastra Daerah-Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Jurusan Sastra Melayu.

Ia bekerja di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) Tanjungpinang sejak tahun 2000. Selain melakukan penelitian kebudayaan, ia juga telah beberapa kali mengalih-aksarakan manuskrip Melayu lama. Pernah mengelola majalah terbitan BKSNT, Marwah. Sekarang ini ia sedang mengambil program Magister Museologi yang merupakan kerjasama antara FS-UNPAD, Depbudpar, dan Rochelle University, Perancis.

Perpustakaan
Jember

ISBN 978-979-1281-04-1
